



Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Perdagangan Narkoba Dengan Memanfaatkan Teknologi.

^{1*} Askarmin Harun, ²Timbul Dompok.

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau Kepulauan.

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Putera Batam.

Correspondance author: askarmin4@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 10 Desember 2024

Revisi Akhir: 20 Desember 2024

Diterbitkan Online: 23 Desember 2024

KEYWORDS

Drugs, Government, Technology.

KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: askarmin4@gmail.com

A B S T R A C T

Drug trafficking is a serious problem that continues to threaten public security and health. The government is required to develop a more effective strategy in overcoming this problem, one of which is by utilizing technology. This research aims to evaluate the role of the BOSS (BNN One Stop Service) application as a tool to help the government in reducing drug trafficking. The research methods used include collecting primary and secondary data through literature studies, searching for various related information, as well as analyzing drug case data obtained from the BOSS application. The research results show that the BOSS application is able to increase the effectiveness of monitoring and preventing drug trafficking through integrated data collection and analysis. This application not only enables early detection of suspicious activity, but also increases public participation in anonymous reporting, thereby expanding the scope of surveillance. These findings indicate that the use of technology in the BOSS application has great potential to strengthen government efforts to tackle drug trafficking and create a safer environment.

Pendahuluan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya penegakan hukum dan keamanan nasional. Salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia adalah maraknya peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan ekonomi bangsa. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menangani permasalahan narkoba di negeri ini.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan zat-zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan dalam fungsi tubuh serta perilaku seseorang. Narkoba dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Narkotika, seperti morfin dan heroin, umumnya digunakan untuk mengurangi rasa sakit, tetapi juga memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan. Psikotropika, seperti amfetamin dan ekstasi, dapat memengaruhi mood, persepsi, dan proses berpikir, sering kali digunakan dalam

konteks rekreasi, tetapi juga berisiko tinggi bagi kesehatan mental dan fisik.

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kerusakan fisik, gangguan mental, dan peningkatan risiko kecelakaan. Selain dampak kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi termasuk peningkatan kriminalitas, masalah keluarga, dan beban pada sistem kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mengatur penggunaan dan peredaran narkoba dengan ketat untuk melindungi masyarakat. Menurut (Hariyanto,2018) Pemberantasan narkoba menjadi salah satu fokus utama pemerintah dan lembaga terkait, dengan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Perdagangan narkoba adalah perdagangan gelap atau ilegal yang terjadi bahkan hingga tingkat global yang melibatkan pembudidayaan, pembuatan, distribusi, dan penjualan zat yang tidak sesuai dengan undang - undang larangan narkoba. (Khausar, M 2021). Melalui berbagai lembaga seperti BNN dan Kepolisian, pemerintah secara aktif memerangi peredaran gelap narkoba dan

menindak tegas para pengedarnya sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penanganan narkoba di Indonesia. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan: Golongan I (seperti heroin, kokain) yang paling berbahaya dan dilarang untuk medis, Golongan II (morfin) untuk pengobatan dengan pengawasan ketat, dan Golongan III (kodein) dengan risiko ketergantungan rendah. Undang-undang ini memberikan sanksi berat bagi pengedar, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup, sedangkan bagi pengguna lebih ditekankan pada rehabilitasi. Peredaran narkotika hanya boleh dilakukan oleh industri farmasi berizin untuk keperluan medis.

BNN dan penegak hukum diberi wewenang luas dalam penyelidikan, namun tetap dalam pengawasan. Undang-undang ini juga mengatur peran masyarakat dalam pencegahan, program rehabilitasi bagi pecandu, dan penyitaan aset hasil kejahatan narkoba untuk kepentingan negara. Intinya, UU ini menggabungkan pendekatan hukum yang tegas untuk pengedar dengan pendekatan kesehatan dan rehabilitasi untuk pengguna. Selain penegakan hukum, pemerintah juga fokus pada upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda di sekolah-

sekolah. Kampanye anti-narkoba dilakukan secara masif melalui berbagai platform media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

Dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba, pemerintah menyediakan fasilitas rehabilitasi dan bekerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan serta sosial. Program rehabilitasi ini tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tapi juga mencakup pendampingan mental dan sosial agar para korban bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Mengingat permasalahan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, pemerintah Indonesia juga aktif menjalin kerja sama internasional (Mintawati.H, 2021).

Koordinasi dilakukan dengan berbagai negara untuk memberantas jaringan narkoba internasional, termasuk pertukaran informasi dan bantuan penegakan hukum. Indonesia juga terlibat dalam berbagai konvensi internasional yang bertujuan mengendalikan peredaran narkoba global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya penegakan hukum dan keamanan nasional. Salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia adalah maraknya

peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan ekonomi bangsa-bangsa. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilansir dari Kompas.com pada Desember 2023, sepanjang tahun 2023 telah terjadi peningkatan kasus narkoba sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut laporan CNN Indonesia, kasus yang mencengangkan terjadi di Jakarta pada Oktober 2023, dimana aparat berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dengan barang bukti 200 kg sabu-sabu yang ditaksir bernilai ratusan miliar rupiah. Sementara itu, Detik.com melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023, BNN telah menggagalkan lebih dari 500 upaya penyelundupan narkoba melalui berbagai jalur, termasuk pelabuhan dan bandara internasional.

Berbagai permasalahan dalam pemberantasan narkoba masih terus dihadapi, seperti Sulitnya melacak jaringan pengedar yang menggunakan teknologi canggih, keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kurangnya sistem pengawasan yang terintegrasi, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus narkoba dan Maraknya peredaran narkoba melalui platform digital (Yunus,A.2021).

Pemanfaatan teknologi digital dalam upaya pemberantasan narkoba merupakan langkah yang tepat mengingat para pengedar narkoba juga semakin canggih dalam menggunakan teknologi untuk melancarkan aksinya. Melalui Aplikasi BOSS, pemerintah dapat melakukan pemantauan secara real-time, mengumpulkan data dan informasi secara terintegral, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba.

Dalam hal ini menguraikan lebih lanjut tentang peran strategis pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi, khususnya Aplikasi BOSS, sebagai instrumen untuk mengurangi dan mencegah perdagangan narkoba di Indonesia. Pembahasan akan mencakup berbagai aspek mulai dari latar belakang masalah, implementasi teknologi, hingga dampak dan efektivitasnya dalam upaya pemberantasan narkoba, serta rekomendasi untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis, salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital melalui pengembangan Aplikasi BOSS (BNN One Stop Service) Aplikasi ini merupakan inovasi terkini yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap

jaringan perdagangan narkoba. Pemanfaatan teknologi digital dalam upaya pemberantasan narkoba merupakan langkah yang tepat mengingat para pengedar narkoba juga semakin canggih dalam menggunakan teknologi untuk melancarkan aksinya. Melalui Aplikasi BOSS, pemerintah dapat melakukan pemantauan secara real-time, mengumpulkan data dan informasi secara terintegral, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba.

Pendahuluan ini bertujuan menguraikan lebih lanjut tentang peran strategis pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi, khususnya Aplikasi BOSS, sebagai instrumen untuk mengurangi dan mencegah perdagangan narkoba di Indonesia. Menganalisis efektivitas aplikasi BOSS dalam mendukung kinerja pemerintah untuk mengurangi peredaran narkoba Mengidentifikasi peran teknologi dalam membantu penegak hukum melacak dan menindak jaringan narkoba, Mengevaluasi dampak implementasi aplikasi BOSS terhadap tingkat keberhasilan operasi penangkapan pengedar narkoba, Mengkaji strategi pengembangan aplikasi BOSS untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan peredaran narkoba dan

Memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.

Literatur Review.

a. Konsep Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga dalam kedudukannya dalam masyarakat. Sementara itu, pemerintah didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus, dan memimpin suatu negara atau daerah. Memberantas berarti menghentikan atau menumpas sesuatu yang merusak, dan korupsi adalah penyalahgunaan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan (Baharuddin, M.J. 2021).

Dengan mengacu pada definisi tersebut, peran pemerintah dalam memberantas korupsi mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai institusi yang berwenang untuk mengambil tindakan dalam mencegah, menindak, dan menghapuskan praktik korupsi di berbagai sektor negara dan masyarakat. Ini termasuk pembuatan kebijakan antikorupsi, penegakan hukum yang tegas, serta pengawasan terhadap

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

Di Indonesia lembaga yang menangani masalah tersebut sering kita kenal dengan BNN dan kepolisian. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas menangani masalah narkoba. Didirikan dengan tujuan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN memiliki berbagai fungsi penting.

Salah satunya adalah penegakan hukum, di mana BNN memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap kejahatan narkoba, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian. Selain penegakan hukum, BNN juga berfokus pada pencegahan dengan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya narkoba melalui kampanye sosialisasi, khususnya di kalangan remaja.

Di sisi lain, BNN mengelola program rehabilitasi bagi pengguna narkoba untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka serta membantu reintegrasi sosial bagi mantan pengguna. BNN juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemberantasan narkoba di tingkat nasional dan menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah lain, organisasi non-pemerintah, serta organisasi internasional untuk mengatasi

permasalahan narkoba. Pengumpulan dan analisis data terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi salah satu tugas BNN, yang bertujuan mendukung kebijakan dan program yang lebih efektif dalam penanganan masalah narkoba. Dengan berbagai peran dan fungsi ini, BNN berupaya menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, serta memberikan dukungan bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan. Sehingga peran pemerintah dalam pemberantasan narkoba sangat penting karena narkoba merupakan ancaman serius bagi masyarakat dan negara.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba, baik itu pengguna, pengedar, maupun produsen (Friskatati, H. 2024) Penindakan yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi peredaran narkoba di masyarakat. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menjalankan penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, terutama melalui sosialisasi di sekolah, kampus, dan komunitas.

Pemerintah juga bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba lintas batas, melalui pertukaran informasi,

pelatihan, dan operasi bersama (Rofiana, 2022). Fasilitas rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah bagi pengguna narkoba juga menjadi langkah penting untuk membantu pemulihan pengguna dan memutus rantai peredaran narkoba.

b.Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penegakan hukum.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus-kasus kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba. Teknologi informasi memungkinkan pengawasan dan pemantauan yang lebih baik melalui CCTV dan sistem deteksi otomatis, sehingga memudahkan penegak hukum dalam mencegah dan mengungkap kejahatan dengan lebih cepat.

Teknologi juga mendukung pengumpulan dan analisis data yang lebih akurat, membantu aparat penegak hukum dalam mengenali pola-pola kejahatan dan membuat keputusan yang berdasarkan data. Sistem manajemen kasus berbasis teknologi memudahkan pengelolaan informasi dan penyimpanan bukti secara aman, yang memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara instansi penegak hukum (Djati.J.2024). Teknologi informasi juga memperluas akses masyarakat untuk

memperoleh edukasi hukum secara online, sehingga kesadaran hukum di masyarakat dapat meningkat. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum di tingkat nasional maupun internasional juga lebih mudah dilakukan berkat teknologi, yang memperkuat kemampuan pemerintah dalam menangani kejahatan lintas negara, termasuk peredaran narkoba.

Kajian teori mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum melibatkan berbagai pendekatan yang menjelaskan bagaimana teknologi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Berikut adalah beberapa teori yang relevan dalam memahami konsep ini:

1. Teori Modernisasi.

Teori modernisasi berpendapat bahwa perkembangan teknologi adalah kunci untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Dalam konteks penegakan hukum, penerapan teknologi informasi seperti sistem manajemen data, analisis kriminal berbasis algoritma, dan perangkat lunak pemantauan dapat meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi kejahatan. Teori ini menunjukkan bahwa dengan mengadopsi teknologi, lembaga penegak hukum dapat berfungsi lebih efektif dan responsif

terhadap tantangan keamanan modern (Irwan.L.Y.2023).

2. Teori Sistem Informasi.

Teori sistem informasi, seperti yang dijelaskan oleh Laudon dan Laudon, menekankan pentingnya pengelolaan informasi dalam organisasi. Dalam penegakan hukum, teknologi informasi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang efisien, sehingga meningkatkan kemampuan lembaga untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti (Kesumadewi, A. K. 2020). Dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi, lembaga penegak hukum dapat berbagi informasi secara real-time dan meningkatkan kolaborasi antar instansi.

3. Teori Kriminalitas Terorganisir.

Teori ini menggarisbawahi pentingnya memahami pola-pola kejahatan dalam konteks yang lebih luas. Teknologi informasi membantu dalam analisis data untuk mengidentifikasi dan memetakan jaringan kriminal, serta mengungkap modus operandi kejahatan terorganisir (Lukman,2021). Dengan alat analisis yang canggih, penegak hukum dapat melacak aktivitas kriminal dan mengembangkan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran.

4. Teori Keamanan *Cyber*.

Teori keamanan siber membahas tantangan dan risiko yang muncul seiring

dengan penggunaan teknologi informasi. Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu melindungi data dan sistem mereka dari serangan siber (Paretanan, E 2021). Penegakan hukum harus menyelaraskan upaya penanganan kejahatan tradisional dengan kebutuhan untuk melindungi informasi digital, sehingga teknologi tidak hanya menjadi alat penegak hukum tetapi juga memerlukan perlindungan.

5. Teori Transparansi dan Akuntabilitas.

Teori ini menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan data dan informasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat menyediakan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk mengawasi kegiatan penegakan hukum. Ini dapat menciptakan tekanan sosial untuk mendorong praktik yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (Ramadhani, 2018).

6. Teori Inovasi Terbuka.

Teori inovasi terbuka, yang diperkenalkan oleh Henry Chesbrough, menekankan kolaborasi antara berbagai pihak dalam menciptakan solusi inovatif. Dalam konteks penegakan hukum, pemanfaatan teknologi informasi dapat melibatkan kerja sama dengan sektor swasta, universitas, dan masyarakat sipil

untuk mengembangkan alat dan sistem baru yang meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kolaborasi ini memungkinkan pengembangan solusi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

7. Teori Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti.

Teori ini menyoroti pentingnya menggunakan data dan analisis untuk membuat keputusan yang informasional dan berbasis bukti. Dalam penegakan hukum, teknologi informasi memungkinkan aparat untuk mengumpulkan data terkait kejahatan, perilaku kriminal, dan efektivitas intervensi, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih terencana dan berdasarkan analisis yang mendalam.

Dengan pemanfaatan teori-teori ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat integritas, akuntabilitas, dan responsivitas lembaga penegak hukum terhadap dinamika kejahatan yang terus berubah.

Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi BOSS dalam

mengurangi perdagangan narkoba. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen akademik terkait teknologi dalam pengawasan narkoba dan efektivitas aplikasi serupa, yang diperoleh dari Google Scholar. Selain itu, data kuantitatif juga diperoleh langsung dari aplikasi BOSS, termasuk jumlah kasus yang terdeteksi, pola peredaran narkoba, tingkat pelaporan masyarakat, dan respons aparat penegak hukum.

Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi pengumpulan dan analisis data statistik yang ada dalam aplikasi BOSS untuk periode tertentu, guna mengidentifikasi pola dan tren perdagangan narkoba. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan temuan dalam dokumen akademik terkait yang dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur efektivitas aplikasi BOSS berdasarkan jumlah laporan, tingkat keberhasilan pencegahan, serta tingkat pengawasan secara keseluruhan. Hasil analisis statistik digunakan untuk memberikan gambaran objektif mengenai peran aplikasi BOSS dalam membantu pemerintah mengurangi perdagangan narkoba.

Hasil Dan Pembahasan.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pemberantasan Narkoba Pemerintah telah mengambil langkah inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi BOSS (Badan Narkotika Nasional One Stop Service) untuk mengurangi perdagangan, pengawasan dan rehabilitasi pendidikan mengenai narkoba. Aplikasi ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap perkembangan teknologi dalam upaya pemberantasan narkoba. Fitur dan Fungsi Aplikasi BOSS memiliki beberapa fitur utama yang mendukung upaya pemberantasan narkoba:

- a. Sistem pelaporan Online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba secara anonim dan real-time.
- b. Pemetaan daerah rawan narkoba berdasarkan data yang terkumpul, membantu aparat dalam menargetkan operasi.
- c. Sistem informasi terpadu yang menghubungkan berbagai instansi penegak hukum untuk berbagi data dan informasi terkait kasus narkoba.
- d. Modul edukasi interaktif tentang bahaya narkoba untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat.

Penggunaan teknologi dalam pengawasan narkoba terbukti sangat efektif dan memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek (Oktaviani S, 2022). Dengan informasi yang diperoleh secara langsung, penegak hukum dapat merespons dengan cepat terhadap aktivitas mencurigakan. Selain itu, analisis data menjadi salah satu alat penting. Dengan memanfaatkan Big data dan analitik, pihak berwenang dapat mengidentifikasi pola dan tren penyalahgunaan narkoba.

Data yang berasal dari sumber-sumber seperti media sosial, laporan rumah sakit, dan data kepolisian dapat dianalisis untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peredaran narkoba. Teknologi juga memberikan kemudahan dalam pelaporan. Melalui aplikasi mobile dan platform online, masyarakat dapat melaporkan kegiatan narkoba secara anonim, yang meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan dan pencegahan.

Selain itu, alat deteksi narkoba berbasis kimia dan perangkat pemindai digunakan untuk mengidentifikasi narkoba di berbagai tempat, termasuk bandara, perbatasan, dan acara publik. Pendidikan dan kampanye kesadaran juga dapat dioptimalkan melalui teknologi. Media sosial, video edukatif, dan aplikasi

kesehatan digunakan untuk menjangkau masyarakat luas dan memberikan informasi mengenai bahaya narkoba.

Tak kalah pentingnya, teknologi memungkinkan kolaborasi internasional dalam memerangi peredaran narkoba. Dengan berbagi informasi tentang jaringan narkoba internasional, penegakan hukum dapat melacak dan menghentikan penyelundupan dengan lebih efektif (Gultom, 2024). Meski demikian, ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti isu privasi, biaya implementasi, kebutuhan untuk terus memperbarui dan mengamankan sistem dari ancaman siber,.

Perlunya edukasi masyarakat tentang penggunaan aplikasi secara bertanggung jawab, keterbatasan akses internet di beberapa daerah yang dapat menghambat efektivitas aplikasi dan kebutuhan pelatihan untuk pengguna teknologi tersebut. Namun, secara keseluruhan, integrasi teknologi dalam pengawasan narkoba menunjukkan hasil yang positif dan memperkuat upaya pencegahan serta penegakan hukum.

Dengan melihat data survei kepuasan penggunaan layanan aplikasi di dapatkan bahwa Sistem, mekanisme dan prosedur memperoleh skor terendah sebesar 93,75, menurut temuan pemrosesan data. Selain itu, spesifikasi produk untuk kategori fasilitas dan layanan

diberikan skor yang sama yaitu 93,75. Waktu penyelesaian, yang diberikan skor tertinggi 100 dari semua aspek layanan, dan kompetensi pelaksana, serta cara mereka menangani keluhan, rekomendasi, dan masukan, adalah tiga elemen layanan yang mendapatkan skor tertinggi.

Dengan skor SKM sebesar 98,66, pelaksanaan layanan publik Direktorat Hukum BNN secara umum mencerminkan tingkat kualitas Sangat Baik, menurut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Layanan Konsultasi Hukum yang dilakukan melalui Boss.bnn.go.id antara Januari dan Juni 2023. Ini menunjukkan bahwa kinerja penyampaian layanan publik meningkat secara bertahap antara tahun 2021 dan 2023. Untuk membuat layanan konsultasi hukum menjadi lebih baik, tim akan terus meningkatkan layanan tersebut sebagai respons terhadap masalah yang muncul (BNN, 2024).

Menurut laporan media nasional, 4.8 million orang Indonesia di antara usia 15 dan 64 tahun terpapar narkoba pada tahun 2023, menurut sumber dari National Narcotics Agency (BNN). Menurut data terbaru dari Indonesian Drugs Report 2023, yang dirilis oleh BNN RI, ada 1,150 jenis New Psychoactive Substances (NPS) yang diidentifikasi di seluruh dunia. Sementara itu, menurut Indonesian Drugs Report 2023, yang dirilis oleh BNN RI,

ada 91 (sembilan puluh satu) jenis NPS yang ditemukan di Indonesia. Menurut data yang dikumpulkan dari Research, Data, and Information Center of the National Narcotics Agency (Puslitdatin BNN), prevalensi drug abuse meningkat dari 1,80% pada tahun 2021 menjadi 1,95% pada tahun 2022.

Namun, dari 2021 hingga 2023, jumlah orang yang menggunakan narkoba turun 0,22%, atau sekitar 3,3 juta orang. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 300.000 anak-anak di negara kita telah diselamatkan dari penggunaan narkoba (Kemenhub RI, 2024). Pemanfaatan teknologi melalui aplikasi BOSS menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengadopsi pendekatan modern untuk mengatasi masalah perdagangan narkoba berdampak positif dalam akses informasi tentunya. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, aplikasi ini telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Dengan pengembangan lebih lanjut dan dukungan masyarakat, aplikasi BOSS di Indonesia.

Simpulan

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi perdagangan narkoba dengan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi BOSS. Aplikasi ini merupakan inovasi

strategis yang memungkinkan pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan pemantauan peredaran narkoba secara lebih efektif dan terintegrasi. Melalui BOSS, pemerintah dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti laporan masyarakat, data kepolisian, dan data medis, untuk mengidentifikasi pola peredaran narkoba, mengantisipasi titik-titik rawan, serta merespons lebih cepat terhadap aktivitas yang mencurigakan.

Selain itu, aplikasi BOSS juga meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan dengan menyediakan fitur pelaporan anonim. Hal ini memberi peluang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba tanpa rasa takut, sehingga memperluas jangkauan dan ketepatan upaya pencegahan. Teknologi.

BOSS membantu pemerintah memperkuat kolaborasi antar lembaga penegak hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional, untuk memerangi jaringan perdagangan narkoba dengan lebih optimal. Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi melalui aplikasi BOSS memperkuat efektivitas pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

Daftar Pustaka.

- Baharuddin, M. J. (2021). Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar. *Alauddin Law Development Journal*, 3(3), 591-599.
- Djati, J., Madiistriyatno, H., & Nurakhim, B. (2024). Pengaruh Kompetensi Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Manajemen Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(2).
- Friskatati, H. (2024). Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1).
- Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 33-42.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210.
- Irsan, L. Y., Musrizal, R. R. K., Dimlana, R. S., Dzaki, A., & Antoni, H. (2023). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Dan Mengatasi Peredaran Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus: Tedy Minahasa). *Yustisi*, 10(3), 40-44.
- Kesumadewi, A. K. (2020). Penerapan E-Government Di Indonesia Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 7(1), 101-116.
- Khausar, M., Harutogu, S. A., & Rofii, M. S. R. (2021). Upaya Pemerintah Turki Dalam Menyelesaikan Masalah Kejahatan Transnasional Terorganisir “Perdagangan Narkotika Psikotropika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)”. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(06), 959-972.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2(3), 405-417.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.
- Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 137-143.
- Paretanan, E., Darwis, W., Darwis, W., Barung, D. U. L., Putri, N. L., Intan, R., & Rome, M. (2021). Peran Teknologi Berbasis Gadget Dalam Memberantas Korupsi. *Prosiding Universitas Kristen Indonesia Toraja*, 1(1), 189-192.
- Ramadhani, N., & Farabi, N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016. *Journal*

Of International Relations
Diponegoro, 5(1), 1074-1081.

Rofiana, R., & Siahaan, N. F. (2022).
Peranan Pemerintah Dalam
Memberantas Penyalahgunaan Dan
Perdagangan Obat-Obatan
Terlarang. *Legalitas: Jurnal Ilmiah
Ilmu Hukum*, 6(2), 16-27.

Yunus, A., & Hofi, M. A. (2021).
Formulasi Kewenangan
Penyadapan Komisi
Pemberantasan Korupsi Dalam
Upaya Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Di Indonesia.
Hukmy: Jurnal Hukum, 1(1), 35-
54.

Sumber Website :

Bnn (06, 2024) Laporan Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
(SkM) Layanan Konsultasi Hukum
P4gn Melalui Boss.Bnn.Go.Id.
Diakses Pada 2 November 2024,
Dari

https://Bnn.Go.Id/Konten/Unggahan/2024/06/Dit.-Hukum_Skm.Pdf

Kemhub RI (03.06.2024) Sosialisasi
Asn Perhubungan Sehat, Bugar
Dan Bersih Dari Narkoba. Diakses
Pada 2 November 2024, Dari

<https://Kemhub.Go.Id/Post/Read/%E2%80%8bsosialisasi-Asn-Perhubungan-Sehat,-Bugar-Dan-Bersih-Dari>



DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>





Strategi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dalam Peningkatan Minat Literasi Di Kota Batam.

^{1*}Deby Novalia Gultom, ²Timbul Dompok.

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Putera Batam.

Correspondance author: pb201010035@upbatam.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 10 Desember 2024

Revisi Akhir: 20 Desember 2024

Diterbitkan Online: 25 Desember 2024

KEYWORDS

Interest In Literacy, Strategy, Batam City Library And Archives Service.

KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: pb201010035@upbatam.ac.id

A B S T R A C T

This research illustrates that library visits to the Batam City Regional Public Library continue to decline and public interest in literacy needs is also decreasing. The approach method used is descriptive qualitative, namely data collection through observation, documentation and interviews. The results of this research show that the Batam City Library and Archives Service has taken good steps and strategies but their implementation has not been optimal. The Batam City Library and Archives Service can strengthen its strategy and optimize its efforts in increasing public literacy interest. It should be remembered that a comprehensive and integrated strategy will help create a greater positive impact in building a strong literacy culture in Batam City.

Pendahuluan.

Literasi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia mulai sejak dini. Kemampuan literasi yang dimaksud ini berupa kemampuan membaca dan menulis. Dalam konteks literasi membaca, para ahli mendefinisikan kemampuan membaca sebagai proses pemahaman teks wacana sebagai hasil interaksi antara pengetahuan kebahasaan pembaca (kemampuan tingkat kata, frase, kalimat) dan karakteristik yang ada pada teks bacaan (Ulla et al., 2020). Kemampuan ini nantinya akan menjadi bekal bagi penerus bangsa untuk digunakan dalam kehidupan

sehari-hari seperti menambah pengetahuan menjadi kritis dan tanggap dalam suatu hal, isu publik, serta membuka wawasan yang cukup maju untuk perkembangan teknologi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran membaca, terlebih dahulu harus ditumbuhkan minat dalam diri sumber daya manusianya. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut,

maka minat semakin besar (Sari, 2020). Minat baca seseorang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kebiasaan membaca. Karena apabila seseorang membaca tanpa mempunyai kemauan membaca yang tinggi maka orang tersebut tidak akan membaca dengan serius dan sepenuh hati.

Apabila seseorang membaca atas kemauan atau kehendaknya sendiri maka orang tersebut akan membaca dengan sepenuh hati. Apabila seseorang sudah terbiasa dengan membaca, kebiasaan tersebut akan dilakukan secara terus-menerus. Menurut para ahli, minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka akan semakin besar minatnya (Akbar, 2020).

Batam memiliki jumlah penduduk yang besar, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah penduduk dan jumlah pengunjung perpustakaan umum Kota Batam. Artinya, meskipun ada banyak penduduk, tidak banyak yang mengunjungi perpustakaan umum. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi di Kota Batam, yang dapat tercermin dari kunjungan ke perpustakaan daerah, tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Penyebab dari masalah ini bisa sangat bervariasi, mulai dari kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi di antara penduduk, keterbatasan akses terhadap perpustakaan, hingga preferensi masyarakat yang lebih

condong kepada media elektronik daripada literasi tradisional. Strategi yang lebih efektif mungkin diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini, seperti meningkatkan promosi perpustakaan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengadaptasi program literasi sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, pernyataan tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan minat literasi di Kota Batam meskipun memiliki populasi yang besar.

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, Berkurangnya jumlah masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Umum Kota Batam. Minat membaca masyarakat yang rendah mengakibatkan kemampuan berpikir kritis rendah dan sulit mencerna dan memilah berbagai informasi. Keterbatasan akses terhadap perpustakaan. Dari uraian latar belakang diatas maka penelitian ini akan membahas Bagaimana strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dalam meningkatkan minat literasi masyarakat Kota Batam.

Literatur Review.

Dalam lingkungan militerlah ide strategi pertama kali muncul ratusan tahun yang lalu. Kata-kata Yunani "Strategia" atau "Strategios"-yang berarti "jenderal"-

menggabungkan arti "stratos" (tentara) dan "agos" (memimpin) dan dari sinilah kata "strategi" dalam bahasa Inggris berasal. Pengaturan adalah tentang membuat rencana untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Perusahaan dan organisasi terlibat dalam perencanaan strategis ketika mereka ingin meningkatkan keunggulan kompetitif mereka (Hamrun et al., 2020).

Strategi pemerintah adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mencapai keputusan dasar, bersama dengan tekad pemerintah dan cara-cara yang akan digunakan untuk mewujudkannya agar tujuan tersebut dapat tercapai (Putwi & Nurhadi, 2021). Rencana strategis yang berhasil akan membuat semua pihak yang relevan mengetahui tujuan organisasi, rencana masa depan, dan posisi saat ini dalam hubungannya dengan konsumen, saingan, dan hukum (Mukhirto & Fathoni, 2022).

Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), bisnis atau organisasi dapat lebih memahami lingkungan internal dan eksternalnya, menarik kesimpulan yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan strategis, dan menetapkan hirarki kebutuhan (Lukmanul, 2018). Metode yang digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis atau organisasi dikenal sebagai analisis SWOT. Menurut (Rangkuti 1999), analisis ini dibangun di atas kerangka kerja logis yang dapat memanfaatkan kekuatan (strengths) serta peluang (opportunities) dengan cara

meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Terdapat beberapa tahapan Analisis SWOT yaitu (Rangkuti, 2018):

- 1.) Tahap Pengumpulan Data (Input Stage)
- 2.) Tahap Analisis (Matching Stage)
- 3.) Tahap Pengambilan Keputusan

Matriks SWOT merupakan kombinasi antara faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman sehingga akan membentuk empat alternatif strategi dari kombinasi keduanya yakni strategi SO (Strength Opportunities), ST (Strength Threats), WO (Weakness Opportunities), dan WT (Weakness Threats) (Rangkuti, 2001). Kekuatan dan area untuk perbaikan organisasi dapat diidentifikasi menggunakan matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dengan menganalisis berbagai aspek dari area fungsionalnya, termasuk sumber daya manusia, lokasi, produksi, pemasaran, keuangan, dan manajemen (David 2010).

Menurut Miller dan McKenna bekerja sama untuk membuat inisiatif literasi membaca menjadi lebih efektif:

- 1) Proficiency (kecakapan), merupakan prasyarat untuk menggunakan sumber daya informasi apa pun, termasuk tidak buta huruf.
- 2) Access (akses), menyediakan sarana bagi setiap orang untuk mengakses dan memanfaatkan berbagai bentuk informasi, termasuk buku, perpustakaan, dan media.

- 3) Alternative (pilihan), yaitu tersedianya beberapa alat teknis untuk mengakses berbagai bentuk informasi.
- 4) Culture (budaya), merupakan upaya untuk mempromosikan atau menumbuhkan budaya literasi. Cara hidup ini berkembang di rumah, ruang kelas, dan lingkungan sekitar (Dewi & Rustiarini, 2021).

Sutarno (2006) mengelompokkan faktor - faktor yang mempengaruhi minat literasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasa ingin tahu masyarakat atau kebutuhan manusia yang tidak pernah terpuaskan untuk belajar dan mendapatkan akses ke data, informasi, teori, dan konsep yang relevan.
2. Akses masyarakat terhadap berbagai macam bahan bacaan berkualitas tinggi yang menarik dan informatif.
3. Tersedianya waktu yang dapat didedikasikan untuk membaca.
4. Kebutuhan dan rasa ingin tahu masyarakat yang menginginkan dan membutuhkan informasi terkini dan akurat.
5. Berpegang pada keyakinan bahwa membaca adalah praktik spiritual yang penting untuk memperoleh kebijaksanaan, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.

Perpustakaan menurut Sulistyio Basuki adalah tempat di mana buku-buku dan publikasi lainnya disimpan dalam urutan tertentu untuk kepentingan pembaca, bukan untuk dijual (Yenianti, 2021). Sedangkan pengertian perpustakaan menurut KBBI adalah tempat, gedung, ruang yang untuk digunakan sebagai tempat memelihara, dan memanfaatkan koleksi buku dan sebagainya. Sulistyio Basuki mengemukakan peran sosial perpustakaan sebagai berikut:

- 1.) Fungsi Sarana Simpan Karya Manusia.
- 2.) Fungsi Informasi.
- 3.) Fungsi Pendidikan.
- 4.) Fungsi Rekreasi.
- 5.) Fungsi Kultural.

Metodologi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempelajari suatu objek, ruang/kondisi, sekelompok orang atau fenomena lain dalam kondisi alamiah atau nyata (tidak termasuk situasi percobaan) untuk menghasilkan gambaran yang sistematis atau gambaran rinci yang faktual dan juga akurat. Maka dalam penelitian strategi perpustakaan dan kearsipan dalam peningkatan minat literasi di Kota Batam ini, yang menjadi objek penelitian yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, dengan ruang/kondisi

yang mencakup perpustakaan daerah saja. Adapun sekelompok orang yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai perpustakaan dan juga masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan daerah.

Hasil Dan Pembahasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa indikator menurut Freddi Rangkuti yang juga dipakai dan diterapkan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batam dalam mencapai visi dan misi yang dapat mengukur sejauh mana strategi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan masalah-masalah apa saja yang terdapat dalam menjalankan strategi tersebut di dukung oleh sarana dan prasarana yang telah disediakan pemerintah. Berikut penjelasannya:

1. Strength (Kekuatan).

Dalam meninjau sejauh mana strategi dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, strength merupakan salah satu strategi yang dapat menjelaskan kondisi kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam. Adapun kekuatan yang dimaksud dapat berupa aset, sumber daya, kompetensi dan juga keunggulan yang menjadi kelebihan dinas dalam mengoperasikan kegiatannya sehingga menjadi nilai tambahan dan daya tarik jika dibandingkan dengan instansi dan lembaga lainnya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam telah mengoptimalkan strategi dalam meningkatkan minat literasi masyarakat Kota

Batam dengan mengupayakan program Perpustakaan Keliling yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas sehingga masyarakat dapat dengan mudah meminjam buku. Bahkan masyarakat bisa mengenal karya puisi dan cerita pendek melalui lomba-lomba yang di unggah ke sosial media dan juga hadir di mall dan tempat-tempat keramaian.

2. Weakness (Kelemahan).

Selain kekuatan yang dapat menjadi kelebihan dalam menjalankan strategi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam tentunya memiliki kelemahan yang dapat mempengaruhi kemampuan operasinya. Tetapi hal ini diharapkan dapat diminimalisir agar tidak mengganggu jalannya strategi dan program-program yang sedang berjalan. Kelemahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terletak pada terbatasnya armada atau transportasi perpustakaan keliling yang digunakan untuk menjangkau masyarakat secara umum dan pelajar secara khusus.

Kemudian kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam sehingga kunjungan perpustakaan ke sekolah-sekolah dan juga tempat umum lainnya menjadi kurang optimal. Selain itu yang juga tidak kalah pentingnya, standar berdirinya perpustakaan belum terlaksana dengan tepat. Perpustakaan Kota Batam hingga saat ini masih bergabung dengan kantor-kantor kedinasan lainnya di Gedung Bersama Pemko Batam. Kelemahan seperti ini tentunya membuat masyarakat tidak tahu mengenai

lokasi perpustakaan daerah ini. Dalam hal ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum bisa mengoptimalkan strateginya untuk meningkatkan minat literasi masyarakat.

3. Opportunity (Peluang).

Peluang merupakan salah satu aspek dalam menjalankan strategi. Peluang juga merupakan kondisi atau situasi yang dapat menguntungkan atau berpotensi menguntungkan bagi suatu organisasi atau individu untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu di dalam strategi yang telah disusun. Dengan adanya pemanfaatan peluang dengan layanan silang layan dan tersedianya kontak whatsapp maka dengan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam telah melakukan upaya optimalisasi strategi yang cukup baik.

Hal ini menarik bagi peneliti untuk menyimpulkan bahwa strategi pemanfaatan peluang ini memudahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dalam menjangkau masyarakat dan memperkenalkan perpustakaan tanpa harus turun langsung ke lapangan. Hal ini tentunya sangat menguntungkan karena mencapai tujuan meningkatkan literasi dalam hal ini sekolah-sekolah yang mengikuti program silang layan. Dalam hal ini pula, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam sudah cukup baik dan responsif dalam peningkatan minat literasi.

4. Threat (Ancaman).

Ancaman merupakan faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat

kemampuan organisasi atau individu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Ancaman ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pesaing yang agresif, perubahan dalam regulasi pemerintah, perubahan dalam preferensi konsumen, atau bahkan peristiwa alam seperti bencana alam. erdapatnya ancaman-ancaman dalam menjalankan strategi peningkatan minat literasi masyarakat Kota Batam saat ini. Ancaman-ancaman seperti kondisi cuaca buruk dan hujan dapat menghambat jalannya program perpustakaan keliling dan juga sosialisasi literasi. Dalam hal ini, ancaman tersebut.

Tabel 1. Matriks SWOT

IFAS	Strenght	Weakness
EFAS		
Opportunities	Perpustakaan Keliling	Kurangnya kendaraan operasional
	Silang Layan	Kurangnya SDM
	Pemanfaatan teknologi sosial media sebagai sarana promosi	Kurangnya promosi pada masyarakat
Threats	Kolaborasi silang layan	Kondisi cuaca yang buruk saat melakukan layanan perpusakaan keliling
	Pemanfaatan teknologi sosial media sebagai sarana promosi	Pengaruh media elektronik yang dominan

Sumber: David 2010

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Literasi Masyarakat Kota Batam :

1. Prioritas Kebutuhan.

Prioritas kebutuhan merujuk pada sejauh mana individu atau masyarakat menganggap literasi sebagai sesuatu yang penting atau mendesak untuk diprioritaskan dalam kehidupan sehari-hari. Jika literasi dianggap sebagai kebutuhan utama, misalnya untuk memperbaiki kualitas hidup, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau mengakses informasi yang diperlukan, maka minat untuk meningkatkan literasi akan lebih tinggi.

Prioritas kebutuhan ini juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tingkat pendidikan dan pemahaman tentang manfaat literasi dalam kehidupan personal dan sosial. Kesadaran masyarakat tentang kebutuhan literasi masih sangat-sangat minim. Banyak masyarakat yang lebih memprioritaskan untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti handphone dan laptop untuk mengakses informasi bahkan membaca e-book, masyarakat juga lebih memprioritaskan pekerjaan dan aktivitas lainnya dibanding aktivitas literasi yang mungkin lebih cenderung menghabiskan waktu mereka.

Dilihat dari banyaknya tanggapan terkait faktor ini, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam belum optimal. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa aktivitas

literasi tidak terlalu penting dibandingkan dengan aktivitas yang menarik lainnya.

2. Kurangnya Fasilitas.

Fasilitas yang kurang atau tidak memadai dapat menjadi hambatan serius dalam meningkatkan minat literasi. Fasilitas ini meliputi akses terhadap perpustakaan, buku-buku, dan pendukung pembelajaran lainnya. Jika seseorang atau masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ini, maka minat untuk terlibat dalam aktivitas literasi seperti membaca, menulis, atau belajar baru akan terbatas. Masih terdapat kekurangan fasilitas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.

Gedung perpustakaan masih belum efektif untuk menarik perhatian masyarakat dan menumbuhkan minat literasi itu sendiri. Beberapa fasilitas lainnya juga masih belum memenuhi standar yang cukup, tetapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mempunyai upaya yang cukup baik dengan memanfaatkan keterbatasan gedung dan fasilitas untuk mencapai tujuan peningkatan dan menyediakan layanan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat Kota Batam.

3. Media Elektronik dan Audio Visual.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti internet, televisi, radio, dan perangkat elektronik lainnya, dapat mempengaruhi literasi dengan cara yang berbeda. Misalnya, konten yang mudah diakses secara elektronik dapat memperluas aksesibilitas informasi bagi individu, namun sebaliknya juga dapat mengalihkan perhatian

dari membaca teks cetak atau literasi tradisional. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengoptimalkan jalannya strategi yang disusun bersama dengan melakukan pemanfaatan teknologi yang berkembang saat ini. Hal ini menjadi nilai tambah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan karena mampu memberikan layanan yang inovatif demi terwujudnya peningkatan minat literasi masyarakat Kota Batam. Budaya Lisan Masyarakat.

Dibeberapa masyarakat, literasi lisan (keterampilan dalam berbicara dan mendengarkan) dapat mempengaruhi seberapa baik seseorang dapat memahami dan mengolah informasi tertulis. Budaya lisan dapat memperkaya pemahaman bahasa dan pengetahuan tentang budaya, tetapi juga dapat mempengaruhi sejauh mana individu terampil dalam membaca dan menulis. Namun budaya lisan seringkali melibatkan interaksi langsung antara orang-orang, yang tentunya dapat menambah kedekatan dan kehangatan antara masyarakat. Ini berbeda dengan budaya literasi yang seringkali bersifat individualistik dan terkadang kurang menekankan interaksi sosial langsung sehingga terasa membosankan. Budaya lisan masyarakat jelas mempengaruhi turunnya minat literasi masyarakat.

Masyarakat cenderung ingin informasi yang lebih cepat/instan dan juga menarik dalam penyajiannya. Budaya lisan sering kali lebih mudah diakses karena tidak memerlukan

kemampuan membaca dan menulis yang tinggi. Sebagian besar orang dapat berpartisipasi dalam budaya lisan tanpa harus menguasai literasi. Tetapi upaya-upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga cukup optimal untuk mempromosikan literasi sesuai target peningkatan strateginya walaupun tidak ada jaminan bahwa masyarakat bisa tertarik dan terjadi peningkatan minat literasi.

Simpulan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam memiliki berbagai kekuatan internal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan strategis mereka dalam meningkatkan literasi masyarakat. Salah satu kekuatan utama adalah program perpustakaan keliling yang efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama pelajar dari tingkat SD hingga SMA. Terdapat beberapa kelemahan internal yang perlu diatasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, seperti kurangnya sumber daya manusia dan terbatasnya armada perpustakaan keliling. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan kapasitas untuk mencapai lebih banyak masyarakat. Selain itu, kurangnya informasi kepada masyarakat tentang program-program literasi yang tersedia juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Di sisi eksternal, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti meningkatnya permintaan terhadap layanan literasi di

sekolah-sekolah dan potensi untuk berkolaborasi dengan pihak lain dalam mengembangkan program-program literasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini juga dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mencapai lebih banyak masyarakat dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan literasi. Ancaman terbesar yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam adalah faktor eksternal seperti kondisi cuaca buruk yang dapat mengganggu operasional perpustakaan keliling dan mengancam keberlangsungan koleksi buku. Selain itu, pengaruh media elektronik yang dominan dan budaya lisan yang kuat di masyarakat juga dapat mempengaruhi minat terhadap literasi tulisan.

Daftar Pustaka.

- Akbar, A. (2020). *Minat Literasi Mahasiswa. Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2b), 593-596.
<https://doi.org/10.35568/naturalistic.v4i2b.768>.
- Bungsu, A. P., & Dafit, F. (2021). *Pelaksanaan Literasi Membaca di Sekolah Dasar. Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran*, 4(3), 522.
<https://doi.org/10.23887/jp2.v4i3.40796>
- Choirunnisa, I., Karmilah, M., Rahman-89, B., Pengembangan, S., Budaya..., P., Studi, P., Wilayah, P., Kota, D., & Semarang, (2021).
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>.
- Dewi, C. N. K., & Rustiarini, N. W. (2021). *Penataan Perpustakaan Desa Untuk Meningkatkan Literasi Membaca. Losari: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat*, 3, 8-15.
- Gogahu, D. G. S., & Prasetyo, T. (2020). *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis E-Bookstory untuk Meningkatkan Literasi Membaca Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu*, 4(4), 1004-1015.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.493>.
- Hamid, A., & Shintawati, Y. (2019). *Strategi Perpustakaan Kota Surabaya dalam Mewujudkan Surabaya Sebagai Kota Literasi. Magistra Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2).
- Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. (2020). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2),64.
<https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808>.
- Hartina, S. F. (2021). *Perpustakaan Wilayah Di Kota Makassar Dengan Konsep ArsitekturHijau.*
[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11354/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11354/2/D51114018_skripsi_19-10-2021 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11354/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11354/2/D51114018_skripsi_19-10-2021%201-2.pdf).
- Hidayat, R., & Andarini, S. (2020). *Strategi Pemberdayaan Umkm Di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal Di Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. Jurnal Bisnis Indonesia*, 93-109.
- Jatnika, S. A. (2019). *Budaya Literasi untuk Menumbuhkan Minat Membaca dan Menulis. Indonesian Journal of Primary Education*,3(2),1-6.
[https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i2.18112 K](https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i2.18112K).
- Kadow, T., Dengo, S., & Mambo, R. (2021). *Strategi Dinas Perpustakaan Daerah Dalam Meningkatkan Minat Baca*

Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Jap, 7(109), 34-43.

<https://doi.org/10.31764/jiper.v2i1.2218>.

- Kasmira, Alyas, & Sudarmi. (2020). *Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, 1(3), 818-833. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3737>.
- Maesaroh, I. S., Risnawan, W., Juliarso, A., Galuh, U., Barat, J., Daerah, P., & Literasi, B. (2023). *Strategi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan*. 10, 366-379.
- Mansyur, U. (2019). *Gempusta: Upaya Meningkatkan Minat Baca*. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra II* FBS UNM, December, 203-2017. <https://osf.io/va3fk>.
- Mukhirto, M., & Fathoni, T. (2022). *Strategi Pemerintah Desa Gandukepuh Terhadap Pengembangan Objek Wisata Religi*. Journal of Community Development and Disaster Management, 4(1), 23-35. <https://doi.org/10.37680/jcd.v4i1.1264>.
- Pratala, B. (2022). *Faktor Yang Mempengaruhi Minat Baca Praja Ipdn Kampus Jakarta*. Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik, 2(3), 223-237. <https://doi.org/10.51878/academia.v2i3.1528>.
- Putwi, N. S., & Nurhadi. (2021). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul*. Jurnal Enersia Publika, 5(2), 474-489.
- Rifauddin, M., & Pratama, B. A. (2020). *Strategi Preservasi Dan Konservasi Bahan Pustaka Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek*. Jurnal Ilmu Perpustakaan (Jiper), 2(1), 17-23.
- Sari, P. A. P. (2020). *Hubungan literasi baca tulis dan minat membaca dengan hasil belajar bahasa indonesia*. Journal for Lesson and Learning Studies, 3(1), 141- 152.
- Setiawan, H., Aji, S. M. W., & Aziz, A. (2019). *Puisi Berbasis Hasil Karya Gambar: Upaya Penguatan Literasi Siswa Sd Kelas Tinggi*. *Inteligensi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 50-60. <https://doi.org/10.33366/ilg.v2i1.1559>.
- Sugianto Sugianto. (2023). *Mewujudkan Budaya Literasi Melalui Peningkatan Minat Baca Pada Usia Dini*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1),70-75. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i1.11211>.
- Ila, N., Sahiruddin, & Khasanah, I. (2020). *Sosial budaya yang Berpengaruh Terhadap Minat Membaca Mahasiswa Unmer Malang Kondisi minat baca bangsa Indonesia memang cukup meprihatinkan* .Most Littered Nation In the World " yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity p. Diglossia, 11(2), 41-54.
- Yenianti, I. (2021). *Analisis Pemikiran Sulistyo Basuki Dan Wiji Suwarno Tentang Fungsi Perpustakaan Dalam Masyarakat*. Maktabatuna, 3(1), 108-124. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/maktabatuna/article/view/3168/0%0Ahttps://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/maktabatuna/article/viewFile/3168/2015>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*.



Evaluasi Kebijakan Publik Pemerintah Kota Batam Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

¹Iranda Firiansyah ²M Khoiri ³Muhammad Haldy.

^{1*}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam.

^{2,3}Program Studi Manajemen, Universitas Putera Batam.

Correspondance author: : iranda.firiansyah@puterabatam.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 10 Desember 2024

Revisi Akhir: 20 Desember 2024

Diterbitkan Online: 23 Desember 2024

KEYWORDS

Evaluation, Public Policy, Education Quality, Social Inequality.

KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: iranda.firiansyah@puterabatam.ac.id

A B S T R A C T

Education is an important component in developing quality and competitive human resources (HR), especially in industrial areas such as Batam. The uneven quality of education between the city center and peripheral areas, as well as the lack of educational facilities in a number of schools, hinder efforts to produce a workforce that is ready to compete at the global level. This article aims to analyze the evaluation and challenges in the Batam City Government Policy Regarding Improving the Quality of Education. This study applies a qualitative approach with a review of scientific literature and secondary data analysis from official documents and the media. The research findings indicate the significance of policies that prioritize adequate education budget allocation, program innovations such as e-learning, and collaboration with the private sector. The main challenge faced is the disparity between the central and peripheral areas of Batam regarding access to quality education and improving teacher professionalism. Thus, an assessment of education policies that prioritize improving education facilities, training, and funds is very important to support sustainable economic growth and reduce social inequality in Batam.

Pendahuluan.

Pendidikan adalah fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetitif. Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam pengembangan sosial dan ekonomi, terutama di Kota Batam, yang merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Batam terkenal sebagai area industri yang besar, terutama dalam bidang manufaktur, elektronik, otomotif, dan layanan. Selain itu, Batam adalah salah satu tujuan wisata yang terkenal di Asia Tenggara, yang menarik minat pengunjung dari domestik

maupun mancanegara. Dalam kemajuan pesat ini, Batam menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas guna mendukung berbagai sektor ekonomi. Sebagai kota yang cepat berkembang dan menjadi pusat perdagangan, industri, serta pariwisata, Batam memerlukan sumber daya manusia yang terampil, berpendidikan, dan siap untuk menghadapi tantangan global.

Tenaga kerja terampil dapat menurunkan ketergantungan pada buruh asing dan memperkuat daya saing industri dalam negeri, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di samping itu, pendidikan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Batam untuk terlibat dalam industri yang lebih modern dan berinovasi, seperti teknologi digital dan ekonomi kreatif. Pendidikan mampu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan komunitas.

Di Batam, terdapat perbedaan yang signifikan antara kawasan perkotaan yang berkembang pesat dan daerah pinggiran yang masih tertinggal dalam akses pendidikan dan lapangan kerja. Pendidikan yang setara akan mendukung individu dari latar belakang ekonomi yang rendah untuk menguasai keterampilan yang diperlukan di pasar kerja, sehingga mereka dapat memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Selain itu, pendidikan juga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak sosial dan ekonomi mereka, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota.

Secara umum, Batam memiliki sistem sekolah yang cukup baik, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA). Di pusat kota, mutu pendidikan di sekolah-sekolah negeri dan swasta umumnya lebih baik dibandingkan dengan daerah pinggiran Batam. Beberapa

sekolah di Batam telah mengadopsi kurikulum yang lebih mutakhir dan dilengkapi dengan fasilitas yang baik, seperti laboratorium, perpustakaan, dan sambungan internet. Namun, mutu pendidikan ini masih berbeda-beda antar sekolah, terutama antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

Banyak sekolah swasta yang dikelola dengan baik memiliki mutu pendidikan yang sangat tinggi, bahkan beberapa di antaranya menerapkan kurikulum internasional yang memenuhi standar global. Di sisi lain, sekolah umum di beberapa daerah sekitar Batam mengalami berbagai kekurangan, baik dalam fasilitas maupun mutu pengajaran. Salah satu isu utama adalah perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah pusat kota dan daerah tepi Batam. Di pusat kota, terdapat banyak sekolah dan institusi pendidikan yang dilengkapi dengan fasilitas modern dan pengajar yang berkualitas.

Namun, di kawasan terpencil dan kepulauan, sarana pendidikan masih minim, dan mutu pengajaran sering kali tidak memenuhi standar yang diinginkan. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Walaupun Batam mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sejumlah sekolah, terutama yang terletak di area pinggiran dan kepulauan, masih menghadapi tantangan terkait fasilitas yang tidak memadai. Sebagian sekolah masih menghadapi kekurangan ruang kelas yang memadai, fasilitas belajar seperti buku teks dan alat peraga, serta sarana pendukung lain seperti laboratorium dan akses internet. Kendala ini

berpengaruh pada proses pembelajaran yang efisien dan menghalangi siswa untuk mengoptimalkan potensi mereka.

Kualitas pengajaran adalah salah satu elemen kunci dalam pencapaian pendidikan. Di Batam, walaupun banyak guru yang sangat berdedikasi, tantangan dalam pengembangan profesionalisme guru tetap ada. Tidak semua tenaga pengajar di Batam mendapatkan peluang untuk mengikuti pelatihan yang dapat memperbaiki kemampuan mengajar mereka, terutamadalam mengimplementasikan teknologi pembelajaran terbaru atau metode pedagogis yang lebih efisien. Guru dengan latar belakang pendidikan yang solid dalam bidangnya dan mampu mengajar secara menarik serta sesuai dengan kebutuhan zaman sangat diperlukan, terutama dalam mempersiapkan siswa untuk siap bekerja di industri yang terus berkembang.

Pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan serta pelatihan guru untuk memenuhi tuntutan pendidikan yang kian meningkat. Pembahasan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan telah dijabarkan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Abdurrozzaq Hasibuan, 2017), menyebutkan Kebijakan pemerintah daerah berperan signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan, namun implementasinya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Selaras dengan pernyataan tersebut, (Dodi Ilham, dkk, 2023) juga menyatakan Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan

kualitas pendidikan melalui berbagai dimensi, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya.

Kemudian berdasarkan penelitian (Safrida, Nila Safrida, Muhammad,2021) juga menyatakan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah daerah masih belum maksimal diakibatkan karena keterbatasan anggaran, minimnya kerjasama antara dinas pendidikan dan masyarakat, serta terbatasnya kualitas dan kuantitas pengajar di daerah terpencil. Berdasarkan penelitian (Taufiqurokhman, dkk, 2023) menyatakan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memajukan kualitas SDM melalui pendidikan, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi di lapangan.

Selain itu, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga menjadi alasan rendahnya kualitas pendidikan, sebagaimana hasil penelitian (Suparno & Alfikar, 2019), yang menjelaskan rendahnya kesadaran pendidikan pada masyarakat masih menjadi masalah dalam implementasi UUD 1945 Pasal 31 ayat 1, ditandai dengan rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan. Oleh sebab itu, pemberian bantuan biaya sekolah, pemberian motivasi, dorongan serta penguatan agar anak bersekolah adalah sesuatu yang benar-benar penting.

Dalam hal ini, pendidikan berperan sebagai solusi utama untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Pendidikan yang baik dan sesuai dengan permintaan pasar kerja dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,

menurunkan kemiskinan, memperbaiki kesenjangan sosial, dan yang paling utama, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Literatur Review.

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian atau tahap terakhir dari suatu kebijakan publik, dengan kata lain sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja, melainkan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai "evaluasi kebijakan". Evaluasi kebijakan itu sendiri dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta untuk mencari kekurangan sekaligus untuk menutup kekurangan. Evaluasi ini merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang ditentukan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah merupakan penilaian terhadap serangkaian tindakan yang telah direncanakan, diputuskan, dan dilakukan, dimana tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam peninjauan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang. James Anderson (Winarno,

2002) membagi evaluasi implementasi kebijakan publik menjadi tiga, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional,
2. Evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan,

Evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan dicapai.

Metodologi

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur akademik dalam bidang kebijakan publik untuk mendapatkan ide-ide yang sesuai dengan Evaluasi Kebijakan Publik Pemerintah Kota Batam Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber, baik dokumen pemerintah maupun berita media cetak dan elektronik, sebagai data sekunder yang selanjutnya diolah dan dijelaskan dalam bentuk narasi sesuai kebutuhan data. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep kebijaka. Teknik analisis ialah Triangulasi.

Hasil Dan Pembahasan.

A. evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Batam.

Pendidikan dasar dan menengah di Kota Batam, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan terkait pemerataan dan mutu. Pemerintah Kota Batam telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki mutu pendidikan di tingkat dasar dan menengah, terutama dalam peningkatan sarana pendidikan, penyediaan beasiswa, serta pelatihan bagi para guru. Kebijakan-kebijakan ini adalah bagian dari usaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Batam.

Adapun evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Batam dalam tiga aspek utama:

1) Peningkatan Fasilitas Pendidikan

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah melaksanakan berbagai langkah untuk mengembangkan fasilitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil mencakup:

a) Pembangunan dan Perbaikan Sekolah .

Pemerintah secara berkala membangun dan memperbarui sekolah-sekolah, khususnya di wilayah yang belum mempunyai fasilitas pendidikan yang cukup. Di kota yang tumbuh cepat seperti Batam, langkah ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga.

b) Penyediaan Sarana Teknologi

Dalam beberapa tahun terakhir, Batam juga berusaha untuk menggabungkan teknologi ke dalam sistem pendidikannya. Ini mencakup penyediaan komputer, proyektor, dan akses internet di beberapa sekolah, khususnya di sekolah negeri.

c) Pengembangan Fasilitas Sekolah

Bagi sekolah-sekolah yang terletak di lokasi terpencil atau kepulauan, Batam juga berusaha meningkatkan infrastruktur dan fasilitas seperti ruang kelas yang memadai, sarana olahraga, serta laboratorium.

2) Program Beasiswa.

Kebijakan yang diterapkan di Batam meliputi beberapa program beasiswa untuk membantu siswa berprestasi dan mereka yang kurang mampu secara finansial agar dapat melanjutkan pendidikan. Berbagai kebijakan yang diberlakukan di antaranya:

a) Bantuan pendidikan dari Pemerintah Kota Batam

Pemerintah Kota Batam menawarkan beasiswa bagi pelajar berprestasi di jenjang SD, SMP, dan SMA. Beasiswa ini tidak hanya dialokasikan untuk siswa berprestasi akademik, tetapi juga untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

b) Hibah dari Sektor Bisnis dan Industri

Banyak perusahaan besar di Batam, khususnya yang beroperasi di sektor industri, yang menyediakan beasiswa untuk siswa-siswa berprestasi. Ini adalah wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bertujuan mendukung pendidikan di Batam.

c) Beasiswa Pendidikan Tinggi

Beasiswa ini ditawarkan kepada siswa yang ingin melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam.

3) Pelatihan Guru.

Pemerintah Kota Batam memahami betapa pentingnya mutu pengajaran dalam proses pendidikan. Dengan demikian, pelatihan dan pengembangan guru merupakan salah satu fokus utama dalam kebijakan pendidikan. Berbagai kebijakan yang diimplementasikan dalam konteks ini adalah:

a) Pelatihan dan Sertifikasi Program Pengajar

Pemerintah Kota Batam berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan pelatihan serta sertifikasi untuk guru-guru di tingkat dasar dan menengah. Pelatihan ini meliputi penguasaan kurikulum terkini, strategi pengajaran yang efisien, serta kemampuan teknologi untuk pendidikan digital.

b) Pembangunan Karir Pengajar

Dinas Pendidikan Batam juga menyelenggarakan program pengembangan profesi untuk guru yang meliputi workshop, seminar, dan pelatihan dalam berbagai bidang, mulai dari pengajaran dengan teknologi hingga pengelolaan kelas.

c) Program Penguatan Karakter Pendidikan (PPK)

Sebagian pelatihan guru di Batam juga menitikberatkan pada penguatan pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan sosial siswa, yang menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Walaupun sudah tersedia program pelatihan untuk guru, tidak semua guru dapat mengakses pelatihan itu dengan adil. Pelatihan sering kali hanya diadakan untuk guru-guru di pusat kota, sedangkan guru di daerah terpencil atau kepulauan belum mendapatkan kesempatan yang memadai untuk mengikuti pelatihan yang sesuai.

a) Kualitas dan Signifikansi Pelatihan

Sebagian pelatihan yang diberikan mungkin masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan. Walaupun terdapat pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan, banyak guru mengalami kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis teknologi disebabkan oleh keterbatasan sarana di sekolah mereka.

b) Penghasilan dan Bonus untuk Guru

Masalah lain yang dihadapi adalah insentif atau gaji yang rendah untuk guru yang mengajar di wilayah terpencil. Ini dapat berdampak pada motivasi mereka untuk menghadiri pelatihan tambahan atau memberikan pengajaran yang berkualitas.

Pemerintah Kota Batam telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di antaranya:

- Pada tahun 2025 mendatang akan Membangun sekolah baru, seperti dua SMP di Buliang dan Panglong, serta satu SD di Sei Langkai. Pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk;
- Meningkatkan profesionalitas para guru, salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek).

Beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah:

- Menyusun dan menerapkan kebijakan pendidikan
- Mengalokasikan anggaran pendidikan
- Membangun dan memelihara infrastruktur pendidikan

- Memeratakan akses pendidikan
- Melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan
- Meningkatkan kompetensi guru
- Menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- Meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Dampak dan Tantangan Inovasi Program Pendidikan di Kota Batam

Penerapan berbagai inovasi dalam program pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, seperti pelaksanaan e-learning, pengembangan sekolah unggulan, dan kerjasama dengan sektor swasta, telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di kawasan ini. Namun, di balik manfaat positif yang muncul, ada berbagai tantangan yang perlu diatasi agar inisiatif-inisiatif ini dapat berlanjut dan memberikan hasil yang terbaik bagi generasi muda Batam. Berikut adalah manfaat positif dan tantangan utama yang dihadapi dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Batam:

1) Dampak Positif

- a) Peningkatan Kualitas Pengajaran
Penggunaan e-learning dan pengembangan sekolah unggulan mendatangkan perubahan baik bagi kualitas pengajaran di Batam. Pembelajaran yang didukung teknologi

memberikan kesempatan kepada pengajar untuk memanfaatkan berbagai jenis media pembelajaran digital yang lebih interaktif dan menarik. Sebaliknya, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi juga berkontribusi pada pengayaan metode pengajaran mereka, menjadikan pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan kemajuan zaman.

- **Interaksi yang Lebih Mendalam**

Melalui platform e-learning, guru dapat lebih gampang memberikan umpan balik kepada siswa, berkomunikasi dengan mereka melalui forum diskusi daring, dan menyediakan materi tambahan.

- **Kualitas Pengajaran yang Konsisten**

Pemanfaatan teknologi dapat memperkecil perbedaan dalam mutu pengajaran antara sekolah-sekolah yang ada di pusat kota dan yang berada di daerah terpencil. Melalui e-learning, akses ke materi pembelajaran yang berkualitas semakin meluas.

- b) **Akses Pendidikan yang Setara**

Salah satu sasaran utama dari kebijakan pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan program pendidikan inovatif adalah untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran atau pulau-pulau di sekeliling Batam.

- **Pendidikan untuk Semua**

Dengan e-learning, siswa yang berada di daerah terpencil dapat memperoleh materi pendidikan yang setara dengan siswa di kota besar, meskipun kendala infrastruktur sering kali menjadi rintangan.

- **Kesempatan untuk Belajar bagi Semua Segmen**

Program pendidikan berbasis teknologi memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk terus mendapatkan akses pembelajaran dengan biaya yang lebih terjangkau dan tanpa perlu jauh-jauh pergi ke sekolah.

- c) **Peningkatan Persentase Kelulusan dan Keterampilan Para Lulusan**

Inovasi dalam pendidikan yang menekankan keterampilan praktis dan pendidikan vokasi melalui kolaborasi dengan sektor swasta berdampak positif pada tingkat kelulusan dan kualitas lulusan.

- **Lulusan yang Siap Bekerja**

Program pelatihan yang terintegrasi dengan industri memberikan siswa keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Ini memperbaiki keterampilan teknis dan keahlian praktis, yang memperbesar peluang mereka untuk segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus.

- Persentase Kelulusan yang Lebih Tinggi

Dengan dukungan dari banyak pihak dan perkembangan dalam sistem pembelajaran, tingkat kelulusan di sekolah-sekolah Batam pun menunjukkan peningkatan. Selain itu, program pendampingan belajar dan beasiswa juga membantu siswa yang berisiko putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan.

2) Tantangan yang Dihadapi.

a) Masalah Anggaran

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah keterbatasan anggaran. Meskipun ada alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, anggaran tersebut sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang, terutama dalam hal pengembangan infrastruktur pendidikan, pembiayaan e-learning, dan pelatihan guru.

- Ketergantungan pada Dana Pemerintah dan Swasta

Sebagian besar program inovatif bergantung pada kemitraan dengan sektor swasta dan bantuan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan besar, yang tidak selalu merata di semua wilayah Batam.

- Pendidikan yang Mahal

Sekolah unggulan dan pendidikan berstandar internasional membutuhkan biaya yang besar, baik untuk pengadaan fasilitas yang memadai maupun untuk penyelenggaraan program-program khusus. Hal ini menyulitkan keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

b) Kesenjangan Antar Wilayah

Kesenjangan antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran atau pulau-pulau sekitar Batam masih menjadi masalah yang cukup serius. Meskipun teknologi dan program e-learning telah membantu mengatasi beberapa ketimpangan, masih ada keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang cepat dan perangkat digital yang memadai di daerah terpencil.

- Infrastruktur yang Tidak Merata

Di beberapa daerah terpencil, akses internet masih menjadi kendala utama. Tanpa adanya jaringan internet yang stabil, implementasi e-learning menjadi kurang optimal.

- Keterbatasan Fasilitas Pendidikan di Daerah Terpencil

Sekolah-sekolah di daerah pinggiran atau pulau-pulau sering kali kekurangan fasilitas seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, atau tenaga pengajar yang berkompeten.

- c) Kekurangan Tenaga Pengajar Berkualitas

Meskipun Batam memiliki sejumlah guru yang berdedikasi, terdapat kekurangan tenaga pengajar yang terlatih dalam penggunaan teknologi dan terampil dalam pembelajaran berbasis digital. Selain itu, banyak tenaga pengajar yang belum mendapatkan pelatihan untuk menghadapi perkembangan kurikulum yang lebih modern.

- Keterbatasan dalam Pelatihan Guru

Meskipun ada program pelatihan, masih banyak guru yang tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menguasai teknologi pendidikan yang terus berkembang, terutama dalam pembelajaran berbasis digital.

- Rotasi dan Kekurangan Guru di Daerah Terpencil

Kekurangan tenaga pengajar berkualitas seringkali lebih parah di daerah-daerah terpencil, yang membuat kualitas pendidikan di wilayah tersebut kurang maksimal.

- d) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Meski pemerintah Batam terus mengajak masyarakat untuk aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan masih rendah. Banyak orang tua yang kurang terlibat dalam kegiatan pendidikan anak-

anak mereka, baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah.

- Kurangnya Kesadaran Pendidikan

Masih ada sebagian orang tua yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Beberapa di antaranya lebih fokus pada pekerjaan atau ekonomi rumah tangga, yang mengurangi perhatian terhadap pendidikan anak-anak.

- Keterbatasan Dukungan Masyarakat untuk Program Pendidikan

Program-program seperti magang industri, kegiatan ekstrakurikuler, atau kemitraan antara sekolah dan sektor swasta membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat, namun partisipasi ini terkadang tidak sebesar yang diharapkan.

Inovasi dalam pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Inovasi pendidikan memberikan peluang untuk mengembangkan strategi baru yang efektif dalam pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan pendidikan. Inovasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan kolaborasi antara

pemangku kepentingan pendidikan. Inovasi pendidikan juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa, mempromosikan pembelajaran berkelanjutan sepanjang hayat, dan mempersiapkan siswa untuk tuntutan masa depan yang kompleks. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan dalam mendukung dan mengimplementasikan inovasi pendidikan, serta menyediakan pelatihan dan dukungan yang diperlukan bagi para pendidik.

Simpulan.

Pendidikan merupakan elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, terutama di kawasan industri seperti Batam. Namun, tantangan seperti ketimpangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pinggiran, serta keterbatasan fasilitas, menjadi kendala utama. Pendidikan yang merata dan berkualitas diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif di tingkat global sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.

Peningkatan Fasilitas Pendidikan: Kebijakan meliputi pembangunan dan perbaikan sekolah, pengadaan sarana teknologi, serta pengembangan fasilitas untuk sekolah di daerah terpencil. Namun, ketidakmerataan infrastruktur dan anggaran menjadi tantangan utama. **Program Beasiswa:** Program beasiswa membantu siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu, tetapi distribusi yang tidak

merata dan proses seleksi yang ketat masih menjadi kendala. **Pelatihan Guru:** Pelatihan untuk guru berfokus pada teknologi dan kurikulum modern. Namun, akses yang terbatas dan insentif yang rendah bagi guru di daerah terpencil masih memengaruhi kualitas pengajaran.

Anggaran Pendidikan: Alokasi anggaran yang memadai mendukung pengembangan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan inovasi pendidikan. Namun, kesenjangan antara wilayah pusat dan pinggiran dalam pemanfaatan anggaran masih perlu diatasi. **Inovasi Pendidikan:** Implementasi e-learning, pengembangan sekolah unggulan, dan kemitraan dengan sektor swasta memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan, tetapi tantangan seperti akses teknologi dan penyesuaian kurikulum terhadap kebutuhan industri masih ada.

Penguatan sumber daya manusia, peningkatan anggaran pendidikan, pengembangan infrastruktur yang merata, kolaborasi dengan masyarakat, desentralisasi pengelolaan sekolah, dan penguatan pendidikan karakter adalah langkah strategis yang perlu dilakukan. Meskipun terdapat tantangan dalam pemerataan akses, distribusi anggaran, dan pengembangan tenaga pengajar, kebijakan pendidikan di Batam telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi vital.

Untuk memastikan bahwa inovasi pendidikan ini dapat memberikan keuntungan terbaik bagi seluruh siswa Batam, baik yang tinggal di pusat kota maupun di daerah terpencil. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas di seluruh wilayah Batam.

Daftar Pustaka.

Ahmad, M. (2015). *Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Maju.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam. (2022). *Profil Pendidikan Kota Batam 2022*. Batam: BPS Batam.

Dewi, N. P. (2019). *Kesenjangan Pendidikan di Perkotaan dan Perdesaan: Tantangan dan Solusi*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 34(2), 89-102.

Hafidati, P. (2023). *Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 63-78.

Hasibuan, A. (2017). *Kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan di provinsi sumatera utara*.

Ilham, D., Karunia, L., Saleh, S., & Brata, J. T. (2023). *Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di*

Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(2), 155-162.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud RI). (2020). *Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional 2020-2025*. Jakarta: Kemdikbud RI.

Kota Batam, Pemerintah Kota. (2021). *Laporan Anggaran Pendidikan Kota Batam 2021*. Batam: Pemerintah Kota Batam.

Kusnandi. (2017). *Konsep Dasar Dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan*. *Indonesian Journal Of Education Management And Administration Review*.

Muhammad Ramadhan Raga R, A. T. (2018). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*.

Moriolkosu, D. R., Wenno, I. H., & Rumfot, S. (2024). *Evaluasi Kebijakan Dinas Pendidikan Terkait Peningkatan Kapasitas Guru di Kabupaten Maluku Tenggara*. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 1505-1512.

Nugroho, D. (2017). *Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia: Tantangan di Kota Industri*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 45-60.

Putra, S. (2018). *Inovasi Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas SDM di Batam*. Batam: Penerbit Edukasi.

- Raharjo, T. (2016). *Pengembangan Pendidikan Vokasi di Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Pendidikan.
- Rahmawati, S., & Nurachadija, K. (2023). *Inovasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Strategi Mutu Pendidikan*. Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, 1(5), 01-12.
- Safrida, S., Safrida, N., & Muhammad, M. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat*. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9(2), 71-80.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Sugiyono, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, S., & Alfikar, G. (2019). *implementasi UUD NKRI 1945 pasal 31 ayat 1 melalui pengentasan buta aksara program nasional pemberdayaan masyarakat generasi sehat dan cerdas (pnpmgsc) terhadap peningkatan kesadaran pendidikan masyarakat didesa tawang sari kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang*. Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 4(2), 159-167.
- Sutrisno, A., & Kurniawan, H. (2020). *Evaluasi Kebijakan Anggaran Pendidikan di Indonesia: Studi Kasus Kota Batam*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 8(3), 12-25.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Taufiqurokhman, T., Satispi, E., Izzatusholekha, I., Andriansyah, A., & Samudera, A. A. (2023). *Kebijakan Pemerintah Memajukan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul*. Swatantra, 21(2), 189-205.
- Trisnawati, E., & Chiar, M. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Guru Kabupaten Sambas*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 5(11).
- Widodo, P. S. (2019). *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di Daerah Perbatasan*. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan, 10(4), 123-134.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). *Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik*. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2), 545-551.



Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Batam.

¹Rosa Hutahaen, ²Timbul Dompok.

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Putera Batam.

Correspondance author: pb201010023@upbatam.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 10 Desember

Revisi Akhir: 20 Desember

Diterbitkan Online: 25 Desember

KEYWORDS

Policy Evaluation, Road Maintenance, Urban.

KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: pb201010023@upbatam.ac.id

A B S T R A C T

This research examines the important role of the government, especially the Batam City Bina Marga Service, in maintaining and repairing city roads. The length of roads in Batam City reaches 917.20 km, with some still damaged, which causes difficulties and accidents for the community. The research method used is qualitative, with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Research findings show that officials at the Bina Marga Service need special expertise in the road sector and use the Personnel Information System (SIMPEK BATAM) for performance evaluation. Institutional road maintenance involves coordination between the central and regional governments through the Development Planning Conference (Musrenbang). The Highways Department is equipped with adequate facilities, infrastructure, technology and sufficient financial support.

Pendahuluan.

Jalan Salah satu bagian dari infrastruktur yang merupakan bagian sangat penting diberbagai pemabangunan skala nasional dan daerah (Herdiani, 2018). Di Indonesia dalam pembangunan daerah terdapat tiga hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah tersebut yaitu merupakan listrik, Air, serta Jalan (Sriwati et al., 2024). Maka dengan demikian pemerintah pusat wajib memberikan perhatian kepada daerahnya di berbagai infrastrukturnya yang bertujuan untuk menunjang pada kemajuan suatu wilayah tersebut. Salah satu yang menjadi kunci utama dalam pembangunan pada ekonomi masyarakat

yaitu dimana tersediannya sarana umum yang baik, dimana yang merupakan sarana umum itu adalah meliputi jalan penghubung dalam kota, antar kabupaten, serta jembatan listrik dan kepentingan publik lainnya.

Kondisi jalan di Indonesia pada saat ini selalu menjadi permasalahan publik dimana jalan di Indonesia masih banyak kekurangan sehingga banyak pengaduan public mengenai jalan di setiap berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia dimana telah mengeluarkan yaitu Undang – Undang Republik yang dimana didalamnya membahas mengenai jalan yaitu terdapat di UU RI Nomor 38 Tahun

2004 tentang jalan. Adapun isi di dalam UU No 38 tahun 2004 menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang dimana meliputi di berbagai bagian jalan yang dimana dimaksud untuk sebagai pelengkap dan perlengkapannya yang di berikan untuk lalu lintas, yang keberadaannya ada di permukaan tanah, dan diatas permukaan tanah, kecuali yaitu jalan kereta api dan jalan lori.

Ada pun peran jalan dalam Pasal ini menyebutkan yaitu Jalan sebagai landasan komponen dalam peran penting pada bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik dan dalam pertahanan serta keamanan, dan juga untuk kemakmuran pada rakyat. Jalan juga landasan pada sebuah prasarana dibidang distribusi barang serta jasa yang dimana menjadi inti penting pada kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Jalan adalah landasan dalam satu kesatuan pada sistem jaringan yang menghubungkan serta mengikat pada seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dari data yang diperoleh menjelaskan bahwa Panjang jalan di kota Batam yang dimana menjadi tingkat kewenangannya pemerintah Kota Batam pada tahun 2023 yaitu dengan Panjang 917.20 km. awal tahun 2023 jalan provinsi dilakukan adanya pengalihan jalan kepada pemerintahan Kota Batam ke Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Namun fakta yang terjadi dilapangan di Jalanan Kota Batam yang merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau.

Banyak masyarakat Kota Batam memberikan pengaduan publiknya kepada pemerintah yaitu Dengan melalui batam pos mengenai kerusakan jalan Kota yang parah di Kota Batam yang ada di terdapat beberapa pengaduan masyarakat di berbagai media sosial Kota Batam mengenai kerusakan jalan yang ada di Kota Batam sumber dari Tribun Batam Jalan rusak di Batam warga mengeluh , jalan selasih rusak hingga bergelombang dimana pengaduan ini terdapat di tribunnnews Batam.

Keluhan Masyarakat secara umum, ada beberapa ruas jalan yang bergelombang seperti jalan di simpang kuda Batam hingga ke daerah Bengkong yang berpotensi membahayakan kendaraan. Selanjutnya kerusakan jalan yang cukup parah di jalan Laksamana Bintan, di depan Kawasan Industri Hijrah Batam *Center*, akibat kerusakan jalan tersebut cukup parah sehingga menyebabkan kendaraan kesulitan saat melintas dan hampir semua ruas jalan berlubang dan rusak Kondisi dan Panjang jalan di Kota di Kota Batam pada tahun 2023 yaitu 917.20 km. adapun kondisi jalan di kota Batam pada tahun 2023 yaitu: Panjang jalan kondisi baik terdapat 733.91 km, dan Panjang jalan terpelihara 47.74 km, dan Panjang jalan kondisi rusak 50.79 km. terdapat 733.91 km, dan Panjang jalan terpelihara 47.74 km, dan Panjang jalan kondisi rusak 50.79 km. jalan di Kota Batam pada tahun 2023 masih terdapat Panjang jalan dengan kondisi berat yaitu 51.72 km dan dengan Panjang jalan dengan kondisi sedang 80.78 km kemudian Panjang jalan dengan jenis

permukaan aspal 739.99 km atau dan sedangkan panjang jalan dengan jenis permukaan kerikil 9.19 km dan yang terakhir panjang jalan dengan jenis permukaan tanah yaitu 42.45 km.

Berdasarkan dari penjelasan diatas mengenai permasalahan yang ada maka adapun identifikasi masalah diatas yaitu: Masih banyak kondisi jalan kota yang rusak sejak 2021-2023 saat ini menjadi rata-rata 6,9%. Akibat dari kerusakan jalan tersebut membuat masyarakat kesulitan saat melintas, dan megabikatkan kecelakaan pada masyarakat. Panjang jalan kota di Kota Batam yaitu 917.20 km sebagian dari itu masih terdapat kerusakan jalan yang tidak terpelihara dengan baik yaitu 184.14 Km.

Penelitian ini akan menganalisis masalah Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Kota Batam dan Faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Batam?

Literatur Review.

Kebijakan publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas diberbagai bidang yaitu seperti sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum dan sebagainya. Maka dengan demikian kebijakan public dapat dilihat dari sisi samping yaitu hiararkinya, yang dimana kebijakan public dapat bersifat rasional, regional, maupun lokal yakni seperti undang-undang, peraturan pemerintah daerah/ provinsi, dan keputusan gubernur, serta peraturan daerah dari kabupaten/ kota, dan juga Keputusan dari bupati/ walikota. Menurut Budi Winanrno (2020:17) mengartikan kebijakan public yaitu

sebagai hipotesis yang terdapat bentuk kondisi-kondisi awal dan juga akibat -akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan public tersebut harus ada perbedaan dengan bentuk bentuk kebijakan yang lainnya, seperti kebijakan swasta. Sedangkan menurut Robert Eyestone yang telah dikutip oleh Leo Agustino (2020:6) mengartikan kebijakan public yaitu seperti hubungan antara unit pemerintah dengan semua lingkungannya.

Menurut George C. Edwards III (2020:17-18) terdapat beberapa variable yang dimana mempengaruhi pada keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Komunikasi,
- 2) Sumber daya,
- 3) Disposisi,
- 4) Stuktur birokrasi

Evaluasi kebijakan yaitu berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik yang dimana dikarenakan adanya sebuah kajian evaluasi yang harus mampu memenuhi esensi dari akuntabilitas Yaitu antara lain sebagai berikut: Melakukan eksplanasi yang logis atas dasar dari realitis pada pelaksanaan pada suatu program, atau kebijakan. dengan melalui evaluasi maka disini evaluator dapat menemukan yaitu variabel- variabel kebijakan yang diman akan mempengaruhi pada keberhasilan pelaksanaan pada suatu program. Mengukur kepatuhan, dimana maksudnya adalah apakah mampu melihat pada kesesuaian pada antara pelaksanaan yang dengan standar serta pada prosedur yang dimana telah ditetapkan. Untuk melakukan sebagai auditing dalam melihat output kebijakan apakah sampai pada sasaran yang akan dituju,

kemudian ada tidaknya penyimpangan terhadap melaksanakan program tersebut. Akunting yaitu melihat serta mengukur dari akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut

Evaluasi kebijakan menurut model Leo Agustino (2016:196) terdapat lima kriteria yaitu:

1. Sumber Daya Aparatur (SDA). Keberhasilan yang ada pada suatu pelaksanaan kebijakan dan selanjutnya maka akan dievaluasi hasilnya yaitu dilakukan oleh sumber daya aparatur (SDA). Maksudnya adalah pada saat evaluatuor melakukan evaluasi maka, yang untuk pertama kali dievaluasi yaitu aparatur yang pertama dievaluasi, supaya untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dibuat.
2. Kelembagaan. Adapun yang termasuk dalam konteks kelembagaan ini yaitu koordinasi yang lancar, dari diskresi yang fleksibel dan juga sistem pada organisasi, pola kepemimpinan, yang menjadikakn indikasi arah evaluasi yang positif. Maka dengan demikian pada halnya evaluasi kebijakan, apabila pada koordinasi tidak lancar, dan direksi yang fleksibel, dan pada sistem

organisasinya terlalu kaku serta komando pada pola kepemimpinan yang otokratik maka akan dapat membuat suatu kebijakan tidak akan berhasil.

3. Sarana, Prasarana dan Teknologi. Pada kriteria ini akan dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan, Ketika dilakukanya evaluasi apakah pemerintah menyediakan banyak sarana dan prasarana serta teknologi.
4. Finansial. Finansial merupakan salah satu dukungan dari evaluasi kebijakan, finansial merupakan dukungan dari pemerintah yang dimana dalam melakukan evaluasi kebijakan akan lancar dan baik apabila adanya dukungan finansial.
5. Regulasi (pendukung) Pada suatu kebijakan maka sering memerlukan yaitu regulasi pendukung, dimana bertujuan agar dapat dioperasionalkan menjadi lebih aplikatif. Pada era orde baru, maka suatu kebijakan ada terdapat berupa dukungan yaitu petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis dimana supaya untuk memudahkan pada banyak pihak yang menjadi subjek pada suatu kebijakan dalam melakukan mengoperasionalkan kebijakan

tersebut. Maka dengan demikian evaluasi kebijakan akan dapat dinilai dan keberhasilannya akan sangat dipengaruhi yaitu ada atau tidaknya regulasi pendukung.

Terdapat beberapa faktor yang dimana kebijakan tidak dapat mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini disebabkan ada 5 faktor menurut (Dye 2010:155) yaitu: pertama, Adanya keterbatasan dana sehingga mengakibatkan program tersebut menjadi gagal. Kedua, Adanya kesalahan administrasi sehingga yang dimana ditunjukkan dengan misi kebijakan, walaupun isi dari kebijakan tersebut baik namun administrasi kebijakan tersebut sangat jelek, maka implementasi dari kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan.

Ketiga, Kurang adanya komprehensifnya dan tujuan serta sasaran yang jelas pada pertimbangan kebijakan, dimana hal ini disebabkan karena para pembuat kebijakan hanya memperhatikan beberapa faktor-faktor tertentu saja. Keempat, Kebijakan publik tersebut yang bertentangan dengan kebijakan lainnya. Dimana harus ada dukungan dan partisipasi dari pemangku kepentingan lainnya. Kelima, Adanya usaha pada pemecahan masalah yang cukup besar pada sumber yang lebih kecil dari pada bobot masalah itu sendiri dan ketersediaan dan kualitas data, maka evaluasi harus memerlukan data yang akurat dan memadai.

Metodologi.

Jenis metodologi penelitian yaitu kualitatif. pada proses pengumpulan dari kata – kata atau frasa yang berasal dari orang-orang, buku -buku dan juga sumber– sumber lainnya yang dimana dikenal dengan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian ini memilih dan mengidentifikasi berbagai sumber untuk mengumpulkan data dan informasi. Pemilihan informan penelitian didasarkan pada pemahaman khususnya penilaian terkait kebijakan pemeliharaan jalan Kota Batam. Sumber data yaitu primer melalui wawancara dan sekunder menggunakan literatur berupa buku, dokumen dan hasil-hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan ialah triangulasi.

Hasil Dan Pembahasan.

Sejauh mana evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Batam yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimana dengan menggunakan alat dan sumber yang dimana telah tersedia dalam mencapai visi dan misi sehingga dapat diukur untuk menghitung tingkat dari perwujudan sasaran dan untuk menunjukkan sudah sejauh mana sasaran tersebut telah tercapai.

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Bina Marga Kota Batam merupakan indikator dari pelaksana evaluasi kebijakan yang dimana pada pelaksanaan kebijakan yang terlibat dalam evaluasi maka harus ada ketersediaan sumber daya aparatur yang memadai supaya dapat

mengetahui sudah sejauh mana sumber daya aparatur tersebut memahami apa yang harus dikerjakan pada Dinas Bina Marga Kota Batam. Dinas Bina Marga Kota Batam.

Kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Batam pada pelaksanaannya sudah memiliki keahlian pada sumber daya aparatur yang dimana pada saat penerimaan Aparatur harus mengikuti syarat- syarat dan juga harus ada sertifikat-sertifikat dan juga harus memiliki keahlian dalam kemampuan dibidang jalan, dan juga pada untuk evaluasi kinerja sumber daya aparatur yang dilakukan oleh badan kepegawaian pun sudah efektif yaitu dengan adanya sitem informasi kepegawaiannya. Untuk melihat kualitas dari Sumber Daya Aparatur Dinas Bina Marga Kota Batam, dilihat dari laporan-laporan kinerja setiap bulan dan laporan kinerja tahunan yang ada sistem Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

2. Kelembagaan

Pada indikator kelembagaan ini merupakan peran antar lembaga yang dimana terkait dalam pemeliharaan jalan kota di Kota Batam. Yaitu dimana adanya koordinasi yang baik dengan direksi dan juga sistem pada organisasi, pola pimpinan yang ada pada Dinas Bina Marga terkait dalam evaluasi kebijakan di Dinas Bina Marga Kota Batam. Dina Bina Marga dalam evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan di Kota Batam sudah berkoordinasi dengan baik, dengan diakan musrenbang dari masyarakat, pemerintahan daerah, pemerintahan Pemko Batam, dan juga DPRD. Dan juga

kelambagaan juga memberikan sumber daya aparatur yang cukup pada pengelolaan pemeliharaan jalan di Kota Batam sehingga jalan di Kota Batam setiap tahunnya menjadi bagus dan baik.

3. Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Sarana, Prasarana, dan Teknologi pada indikator ini merupakan untuk penelaian dari optimalisasi pada pelaksanaan evaluasi kebijakan, yang dimana untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan dari implementasi dalam pemeliharaan jalan di Kota Batam. sarana, prasaranam dan teknologi yang digunakan oleh Dinas Bina Marga pada pemelihaaran jalan kota di Kota Batam yaitu telah memadai dan berkualitas. Dan adapun peralatan yang digunakan harus melalui proses kalibrasi dan pengujian dengan menggunakan timbangan metrology dan kemudian diperiksa oleh bagian PU, dan akan diberikan sertifikat kelayakan untuk dipakai, proses kalibrasi ini dilakukan setiap tahun dan enam bulan sekali, dan adapun Peralatan yang digunakan yaitu seperti penetrometer dan thermometer inframerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan dalam pengelolaan pemeliharaan jalan kota di Kota Batam.

4. Finansial

Finansial merupakan salah satu indikator yang dimana mendukung dalam evaluasi kebijakan dalam melaksanakan dukungan terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan suatau program dari kebijakan. Pada konteks evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan di Kota Batam

kepada Dinas Bina Marga Kota Batam, dimana yang berkaitan dengan bagaimana anggaran yang dialokasikan dalam pemeliharaan jalan di Kota Batam sudah memadai.

Finansial dalam pengelolaan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam oleh Dinas Bina Marga Kota Batam yaitu direncanakan dengan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Dimana proses ini melibatkan masyarakat dan Dinas Bina Marga, dan dalam pengambilan keputusan yaitu oleh Timbangar Pemko dan Timbangar DPRD dalam menentukan arah kebijakan penganggaran. Dan penetapan anggaran dalam pemeliharaan jalan sudah dilakukan tepat waktu dan efisien yang dimana dilakukan pembayaran setiap anggran lima tahun disetiap tahunnya.

5. Regulasi

Regulasi atau pendukung merupakan unsur yang terpenting dalam pelaksanaan kebijakan, Regulasi yaitu merupakan salah satau sebagai panduan dalam pelaksanaan dalam pentunjuk teknis yang dimana untuk mempermudah banyak pihak dalam melakukan mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Terkait dengan Rugalasi tersebut dalam evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Batam yang dimana dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kota Batam, dan juga apakah regulasi dalam pemeliharaan jalan kota di Kota Batam saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Regulasi atau pendukung pada pemeliharaan jalan kota di Kota Batam yaitu dengan melakukan Musrenbang yang dimana hasil dari musrenbang tersebut adalah masukan dari usulan-usulan dari masyarakat, dan dukungan DPRD, dan dukungan Wali Kota Batam, yang dimana menjadi dasar pembuat kebijakan pada pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan. Dan adapun regulasi dalam meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan kota di Kota Batam yaitu dengan menetapkan standar teknis yang harus dilaksanakan, dan dengan penggunaan alat yang sesuai dengan standar dan memiliki sertifikat layak pakai, dan pada proses pengelolaan tersebut akan diawasi oleh konsultan Dinas Bina Marga Kota Batam. Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Batam.

1. Dana

Dana merupakan salah satu faktor yang dimana sangat mempengaruhi pada kebijakan tersebut, dimana apabila adanya keterbatasan pada dana akan mengakibatkan apa yang akan dilaksanakan atau program apa yang dilakukan akan menjadi gagal dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak dapat terjadi. Untuk alokasi dana pada pemeliharaan jalan di Kota Batam sudah di laksanakan dengan secara proporsional yang dimana sesuai dengan dana yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, dana untuk pemeliharaan jalan di Kota Batam merupakan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi pemeliharaan jalan sudah sesuai dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada Dina Bina Marga,

tetapi sering terjadi kendala yaitu dalam bentuk biaya yang tak terduga, yaitu pada kerusakan jalan yang ditemukan selama proses pemeliharaan ternyata lebih parah dari perkiraan awal, sehingga dapat mempengaruhi dana yang diperlukan. Maka dengan demikian hal ini menunjukkan yaitu perlu adanya perencanaan yang dimana lebih fleksibel pada alokasi dana Cadangan untuk menangani situasi yang tak terduga pada pemeliharaan jalan.

2. Administrasi

Administrasi merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu kebijakan dimana administrasi merupakan visi dan misi dari kebijakan tersebut, apabila administrasi tersebut jelek maka kebijakan tersebut pun akan gagal dalam pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Batam. Dinas Bina Marga dalam pengelolaan pemeliharaan jalan di Kota Batam kebijakannya sudah dilakukan dengan baik dan tersistem. Pada setiap pelaksanaan program atau proyek pemeliharaan jalan maka harus ada bukti dokumentasi yang lengkap dan juga laporan proyek dan kemudian akan diperiksa oleh konsultan pengawas supaya memastikan pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan sesuai dengan rencana. Dan juga administrasi pemeliharaan jalan di Kota Batam telah menggunakan teknologi yaitu sistem Software Manajemen Proyek, yang dimana mempercepat sistem kerja administrasi menjadi lebih efisien dan responsif.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran ini menjadi merupakan hal yang jelas dalam pembuatan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka apabila kurang adanya tujuan dan sasaran yang tidak jelas maka akan sangat mempertimbangkan dari kebijakan tersebut. Tujuan dan sasaran pada evaluasi pemeliharaan jalan di Kota Batam oleh Dinas Bina Marga yaitu dengan didasarkan pada data kerusakan jalan yang dimana diperoleh dengan melalui Survei Deficiency Index (SDI).

Survey ini merupakan untuk membantu mengidentifikasi usia pemeliharaan jalan dan kondisi kerusakannya. Dan untuk mencapai efektivitas dalam pemeliharaan jalan tersebut harus sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Maka Dinas Bina Marga melakukan perencanaan yang sebaik mungkin dalam mempertimbangkan hasil survey. Ketersediaan dana, dan jenis kerusakan baik ringan maupun berat. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemeliharaan jalan dilakukan dengan secara tepat sasaran dan sesuai dengan anggaran yang dimana telah dialokasikan oleh pemerintah daerah, dan sehingga tujuan pemeliharaan jalan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

4. Dukungan dan Partisipasi dari Pemangku Kepentingan.

Dalam melakukan kebijakan pasti ada terdapat beberapa kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan lainnya, maka dengan demikian harus ada dukungan dan partisipasi dari pemangku kepentingan lainnya, supaya

kebijakan. dalam pemeliharaan jalan di Kota Batam, dapat berjalan dengan baik, dan berjalan sesuai apa yang telah ditentukan. Dukungan dan partisipasi dari pemangku kepentingan sangatlah penting dalam pemeliharaan jalan di Kota Batam. Yang dimana masyarakat sebagai partisipan aktif, pada memainkan peran penting pada proses ini karena partisipasi masyarakat tersebut dapat mendorong Dinas Bina Marga untuk lebih akuntabel dalam melaksanakan pemeliharaan jalan. Dan juga Dinas Bina Marga Kota Batam menerima dukungan yang baik dari pemerintah daerah dan masyarakat dengan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Maka dengan ada kegiatan ini memungkinkan adanya masukan dan usulan dari berbagai pihak untuk mendukung proses pelaksanaan pemeliharaan jalan yang lebih baik lagi di Kota Batam.

5. Ketersediaan Data dan Kualitas Data

Dalam melakukan evaluasi kebijakan dalam pemeliharaan jalan di Kota Batam maka harus adanya ketersediaan data dan kualitas data yang baik. Ketersediaan dan kualitas data pada evaluasi pemeliharaan jalan sangat penting bagi Dinas Bina Marga di Kota Batam. Yang para pelaksana kebijakan melakukan survey kerusakan jalan yang dimana berisikan data-data kerusakan, sehingga Dinas Bina Marga dapat mengelola pemeliharaan jalan dengan lebih efektif.

Dengan data yang diperoleh dari survey tersebut memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan dapat lebih akurat, selain itu metode survey kondisi jalan

yang digunakan sesuai dengan standar Kementerian Pekerjaan Umum yang dimana untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan yaitu akurat dan terpercaya. Dan dengan ketersediaan data dan kualitas yang baik Dinas Bina Marga dapat melakukan pemeliharaan jalan di Kota Batam menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Simpulan.

Evaluasi kinerja untuk Sumber Daya Aparatur di Dinas Bina Marga yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEK BATAM). Dan untuk proses pada perencanaan pemeliharaan jalan yaitu melibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang isinya yaitu membahas tingkatan, dengan partisipi masyarakat, Pemko Batam dan DPRD. Untuk kualitas sarana, prasarana, dan teknologi di Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan kota di Kota Batam sudah cukup dan memadai dan juga sudah dikalibrasi sebelum pemakiannya.

Anggaran untuk pemeliharaan jalan yaitu sudah memadai dan disusun dengan melalui Musrenbang dan kemudian disetujui oleh Pemko Batam dan DPRD. Kemudian untuk evaluasi pemeliharaan jalan yaitu dengan menggunakan data yaitu dengan Survei Dificiency Index (SDI) yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam, kemudian dukungan masyarakat, serta pemangku kepentingan juga dalam mendorong

pada akuntabilitas Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam dan untuk proses pada perencanaan pemeliharaan jalan yaitu melibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang isinya yaitu membahas tingkatan dengan partisipasi masyarakat, Pemko Batam dan DPRD.

Untuk kualitas sarana, prasarana, dan teknologi di Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan kota di Kota Batam sudah cukup dan memadai dan juga sudah dikalibrasi sebelum pemakiannya. Anggaran untuk pemeliharaan jalan yaitu sudah memadai dan disusun dengan melalui Musrenbang dan kemudian disetujui oleh Pemko Batam dan DPRD. untuk evaluasi pemeliharaan jalan yaitu dengan menggunakan data yaitu dengan Survei Dificiency Indek (SDI) yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam. Dukungan masyarakat, serta pemangku kepentingan juga dalam mendorong pada akuntabilitas Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam.

Daftar Pustaka.

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Agustina, R. (2023). *Evaluasi kebijakan perbaikan jalan dan penerangan jalan* Rosa Hutahaen, Timbul Dompak
- untuk kelancaran aktivitas warga di jatinangor kota sumedang. 01, 39–43.
- Ajawaila, L. G., Rompas, W. Y., & Tulusana, F. M. G. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi, VII(104), 19–26. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33693/31878>.
- Amanda, P. I. (2019). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. In TheJournalish: Social and Government (Vol. 1, pp. 34–38).
- Dilapanga, A. R. (2019). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRASI) 1(1). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.999>.
- Fitriani, A. (2019). *Kebijakan Penanganan Pemeliharaan Jalan*. FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang., 16(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v16i2.206>
- Hajaroh, M. (2019). *Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)*. Foundasia, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>.
- Hakim, M. L. Al. (2015). *Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya*. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(1), 1–11.
- Handoyo, E. (2010). *Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik*. Jurnal MEDTEK, 2(3), 78–91.

- Herdiani, H. (2018). *Peran Pemerintah Kota Bandung dalam Pemeliharaan Jalan Braga sebagai Kawasan Heritage*. *Jurnal Aspirasi*, 8(2), 104–107. Issn, J. (2023). [Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB) ISSN : 2723-0937. 6, 172–180.
- Kristian, I. (2021). *Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung*. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23–34. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.4> Kualitatif, A. D. P. (n.d.). Bab 10. 157–165.
- Nurmayana, S. (2022). 4-Article Text-3-1-10-20180907. *Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator*, Vol 1 No 7(2), 46-6Pusat, M. J. (2018). No Title. 21(2), 46–65.5.
- Oktaviani, V. P. (2024). *Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak pada SMPN 18 Kota Tangerang Selatan*. 5(1).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*.
- Riyanda, R., & Dompok, T. (2017). *Kebijakan Parkir Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Niara*, 10(1), 21–29. <https://doi.org/10.31849/nia.v10i1.1885>
- Santoso, E. B., Moenek, R., & Nurpahdi, M. (2019). *Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 17–32. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.351>.
- Sriwati, E., Setiawati, B., & Tahir, N. (2024). *Peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur*. *Jurnal Kimap: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 5(1), 104–116.



Overview Hubungan Industrial : *Study Case* Penyelesaian Konflik Kerja Pada PT Swakarya Indah Busana Tanjungpinang.

^{1*}Topo Yudhoyono Harsyahputra, ²Lubna Salsabila.

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Putera Batam.

Correspondance author pb211010017@upbatam.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 10 Desember 2024

Revisi Akhir: 20 Desember 2024

Diterbitkan Online: 25 Desember 2024

KEYWORDS

Solution, Worker Disputes, Industrial Relations

KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: pb211010017@upbatam.ac.id

A B S T R A C T

The aim of this research is to analyze dispute resolution and work strike actions at pt swakarya indah busana tanjungpinang. Actions for arrears in wages carried out by PT. Swakrya Indah Busana which cannot afford to pay lasts for three months, especially in July, August and September. This caused employees to go on strike. The use of the method applied in this scientific work is descriptive qualitative method. The results of this research are that the company's inability to pay is in the case of buyers who are in arrears in payment, but the company's responsibility for workers' rights is still being pursued. The company's agreement to pay unpaid wages and remaining allowances so that workers return to work as before.

Pendahuluan.

Negara Indonesia saat ini sedang gencar dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan. Pembagian tersebut dilaksanakan dengan suatu cara yang berkesinambungan, bertahap serta berencana. Dalam bidang ketenagakerjaan, upaya pembangunan adalah suatu upaya keseluruhan yang dituju untuk menambah kualitas dan perlindungan dan kemampuan kerja. Sekaligus, dituju agar kesempatan kerja meningkat seperti pada di sektor formal ataupun di sektor informal (Satriani 2020).

Pekerja atau buruh juga merupakan anggota aktif masyarakat Bangsa dan

memainkan peran penting dalam memajukan perekonomian Bangsa, partisipasi sektor informal dalam sebuah perekonomian tidak dapat diabaikan. Meskipun para buruh relatif dengan pendapatan dan standar hidup yang tidak memuaskan, mereka mempunyai kekayaan yang besar untuk mendongkrak perkembangan ekonomi Bangsa. Tempat kerja memerlukan lingkungan kerja agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan secara efektif.

Dalam hal ketenagakerjaan, terdapat hubungan antara pengusaha dan pekerja.

Dalam proses perjanjian kerja antara kedua pihak, biasanya terdapat perbedaan antara satu dan lainnya. Menurut ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa hal tersebut diartikan sebagai segala sesuatu secara berkaitan dengan waktu sebelum, setelah dan selama jam kerja. Berdasarkan kajian ketenagakerjaan, bisa diambil kesimpulan bahwa kajian ketenagakerjaan mencakup pemahaman terhadap seluruh peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, didalam konteks hubungan kerja maupun setelah putusannya hubungan tersebut.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengatasi permasalahan. Namun harapan perekonomian yang ada saat ini tidak sesuai. Hal ini terlihat dari berbagai upaya restrukturisasi angkatan kerja yang mengakibatkan lambatnya lapangan kerja sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang tidak meminimalkan risiko yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka (Manurung 2022).

Setiap orang yang menjadi buruh tentunya memperoleh hak yang termuat dalam peraturan ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan, kebijakan atau perjanjian perusahaan seperti perjanjian kerja dianggap sebagai hak buruh normatif. Normatifnya mencakup aspek ekonomi, medis, politik, dan sosial. Pada dasarnya buruh memang memperoleh upah. Selain gaji

atau upah, perolehan perlindungan oleh buruh selama bekerja, maka dari itu perusahaan telah menyiapkan alat pelindung diri dan memberi jamsostek, atau sekarang dikenal dengan nama BPJS Ketenagakerjaan terhadap buruh tersebut. Selain menghormati komitmennya, buruh harus mematuhi kebijakan perusahaan, melaksanakan pekerjaan sesuai tanggung jawab yang diembannya, dan memakai peralatan yang disiapkan perusahaan pada jam kerja. Selain itu, buruh wajib mematuhi kebijakan perusahaan pada jam kerja (L. Sardana 2020).

Masalah dalam hubungan industrial adalah suatu permasalahan yang timbul dari proses industrialisasi, yaitu adanya perbedaan pendapat atau kepentingan suatu usaha dengan usaha lain dalam hubungan industrial. Ketenagakerjaan merupakan topik yang sangat menarik karena sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini harus berhadapan dengan permasalahan profesional dan banyaknya kesempatan belajar (F. Aditya 2021).

Secara psikologis, pertengkaran kerja merupakan luapan dari emosi para pihak yang mengadakan hubungan kerja. Oleh karena itu, masalah kerusakan kerja tidak mudah untuk diselesaikan. Namun agar kepentingan pekerja maupun pengusaha tetap terjaga, gaji kerja harus dapat diminimalkan. Kemampuan meminimalkan gangguan tergantung pada para pelaksana hubungan

industri di perusahaan yang mengelola gangguan untuk mendapatkan solusi yang tepat dan akurat. Dengan demikian setiap aksi penghentian yang akan dilaksanakan telah sama semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suatu pemogokan disebut sah apabila direncanakan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Suatu pemogokan disebut tidak sah atau ilegal apabila dilakukan tanpa perencanaan dan tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Begitupun, pemogokan pada perusahaan yang memberi kepentingan umum dan/atau perusahaan kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang dilakukan oleh buruh yang sedang bekerja dikelompokkan sebagai pekerjaan yang tidak sah.

Perbedaan pendapat mengenai pekerjaan seperti yang kini terdapat dalam suatu perusahaan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. PT. Swakarya Indah Busana. Usaha ini adalah salah satu dari sedikit usaha di Tanjungpinang yang memproduksi di bidang pembuatan pakaian jadi (konveksi), membuat pakaian seperti baju dan kemeja dan bertempat di JL. Panjaitan Kota Tanjungpinang Batu 7. Ketidaksesuaian perolehan upah atau gaji hingga tidak diperoleh dari bulan Juli hingga September 2023. Para buruh melakukan kerja kerja yang ditambah dengan tidak terpenuhinya hak para buruh. Tak hanya itu, BPJS ketenagakerjaan yang tidak dibayar

selama satu tahun atau lebih oleh perusahaan yang bersangkutan juga termasuk (Ierdiana 2023).

Antara buruh dan pengusaha, kesetaraan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada para pekerja yaitu masyarakatnya. Sebagai fasilitator, pemerintah harus memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja Peranan berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek sebagai sarana untuk mendidik tenaga kerja atau buruh. Mereka adalah anggota tim fungsional yang paling penting dalam menegakkan peraturan yang mengatur perjanjian yang dibuat sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT).

Untuk itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas proses penyelesaian dalam konteks konflik terkait pekerjaan, khususnya bagi organisasi yang berkomitmen mengatasi, menyelesaikan, dan memahami permasalahan yang muncul. di PT Swakarya Indah Busana Kota Tanjungpinang. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi di PT swakarya Indah Busana Kota Tanjungpinang dari perspektif hubungan industrial, mengingat masalah ini semestinya diselesaikan mengacu pada cara penyelesaian masalah hubungan industrial. Hal ini juga menjadi

bukti kehadiran pemerintah dalam industrial sebagai penengah dalam mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Literatur Review.

Hubungan industrial adalah hubungan antara pemilik usaha dan karyawan. Pada korelasi tersebut, permasalahan karyawan di tingkat perusahaan dan konflik terkait pekerjaan harus diselesaikan sesegera mungkin melalui musyawarah atau berorientasi secara kekeluargaan. Namun, tidak semua perselisihan antara karyawan dan pemilik usaha dapat diselesaikan secara damai atau kooperatif. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja atau kondisi kerja sehingga menimbulkan asumsi yang tidak dapat dihindari mengenai korelasi industrial.

Perselisihan atau permasalahan sosial bisa terjadi dimana saja, misalnya di rumah, pasar, sekolah, tempat kerja, serta lain sebagainya. Menurut psikologis, perselisihan erupakan hilangnya emosi yang mengganggu suatu hubungan antar orang dan orang lain. Hal ini telah menjadi bagian dari sifat manusia (Nelson 2023). Menelaah tantangan dan peluang di bidang manajemen sektor publik yang menjadi bagian dari SDM di Indonesia merupakan tugas yang menantang.

produktivitas yang masih memiliki kesenjangan, kualitas pekerjaan, dan gender

merupakan tantangan perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja dan perbedaan yang ada antar provinsi. Masih banyak karyawan yang bekerja dengan produktivitas rendah (Anwar 2020). Rivai dalam bukunya *Islamic Human Capital* menyatakan bahwa hubungan antar manusia dalam hubungan kerja adalah perilaku dan persepsi pekerja mengharapkan masa depan, perusahaan mengharapkan perubahan.

Pergeseran seperti perkembangan teknologi yang memerlukan keahlian, keterampilan dan profesionalisme tinggi akan menimbulkan masalah dan tantangan baru dalam hubungan industrial. Tantangan tersebut akan mudah diatasi melalui pengembangan dan pembinaan yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian industrial.

Dalam penataan hubungan industrial harus mempertimbangkan kodrat manusia sebagai manusia yang memiliki budaya serta latar belakang yang tidak sama serta kodrat organisasi sebagai sistem sosial. Peran hubungan manusia terhadap pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan harus tercemin dalam peraturan yang disusun yang berlaku dalam bentuk perjanjian kerja sama ataupun peraturan perusahaan. Penyusunan tersebut harus memperhatikan aspek FIRST (Fairness, Sincerity, Transparency).

Seluruh aturan perusahaan harus disosialisasikan dan dapat diterima dengan

baik oleh pekerja. Namun, masih banyak perusahaan yang memiliki masalah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara buruh dan pengusaha (Zamani 2011). Menurut pasal 11 ayat 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial (PPHI), Permasalahan dalam hubungan industrial merupakan terjadinya pendapat yang berbeda dan menyebabkan perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh hingga serikat kerja serikat buruh yang disebabkan gangguan mengenai hak, gangguan kepentingan, perselisihan antar serikat kerja, serta perselisihan terkait pemutusan kerja.

Perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan. Prinsip penyelesaian hubungan industrial yang dimuat dalam Pasal 136 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

1. Wajib dilakukan oleh pekerja dan pengusaha atau serikat pekerja dalam mencapai mufakat dengan melakukan musyawarah.
2. Bila usaha musyawarah dalam mencapai mufakat tidak dapat dicapai, maka pengusaha dan pekerja atau pekerja serikat pekerja menyelesaikan hubungan persahabatan industrial melalui tata cara yang diatur oleh undang-undang.

Perselisihan tenaga kerja terjadi anatar pihak pekerja dan pengusaha ataupun pengusana atau gabungan pengusaha dan serikat pekerja atau gabungan serikat. Macam perselisihan kerja juga meliputi beberapa hal seperti perselisihan kepentingan, perselisihan hak dan perselisihan antara serikat buruh dalam suatu perusahaan, Salah satu perselisihan yang terjadi dalam perusahaan adalah pemogokan kerja. Pemogokan adalah suatu cara pekerja/kuruh yang telah merencanakan dan dilakukan dengan bersama atau dengan serikat pekerja untuk memberhentikan atau menghambat pekerjaan yaitu memaksa pengusaha untuk menyelesaikan dan enyelesaikan suatu permasalahan.

Mogok merupakan hak dasar setiap pekerja. Pemogokan harus dilakukan secara terencana serta sesuai dengan per-undang-undangan yang ada. Tindakan tersebut dapat berupa:

1. Pekerjaan yang berhenti keseluruhan atau bersama
2. Pemberhentian kerja dengan pukulan keras
3. Menghambat pekerjaan secara masal
4. Tindakan masal yang semuanya berakibat merugikan produksi dan pengusaha.

Perusahaan harus memastikan pekerja memahami bahwa hal tersebut adalah hak dasar pekerja yang akan dilaksanakan secara terencana, sehingga pekerja dapat diberikan pemahaman yang benar tentang filosofi, pengertian, dan cara tatacara inogok tersebut

dilakukan. Lebih baik lagi apabila hal itu termuat dalam perjanjian kerja sama atau peraturan perusahaan

Metodologi.

Pengumpulan data-data suatu penelitian memerlukan metode yang tepat. Metode yang dipilih secara tepat akan mencapai sasaran dan tujuan dari penelitian. Pemakaian metode yang diterapkan didalam karya ilmiah ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode analisis permasalahan menggunakan metode kualitatif berdasarkan referensi dari berbagai sumber berupa jurnal dan artikel ilmiah. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan penelitian analitik. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna (Sugiyono 2017).

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang merupakan kerangka aktivitas mengenai pengumpulan data pustaka melalui kegiatan membaca dan mencatat lalu diolah agar menjadi suatu bahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yang pada biasanya dilakukan dengan cara membaca referensi- referensi seperti buku maupun sumber referensi lainnya dan dikumpulkan. Mengumpulkan serta menganalisis sumber penelitian yang menjadi referensi seperti jurnal, artikel ilmiah, karangan ilmiah maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian agar dapat diolah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan.

Di dunia pekerjaan, pandangan perselisihan merupakan hal yang telah lumrah, karena hal ini sudah sering terjadi di dunia kerja. Salah satu contohnya adalah di PT Swakarya Indah Busana Kota Tanjungpinang, dimana pegawai tidak melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Aksi Pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan PT Swakarya Indah Busana dilakukan dengan cara mogok kerja. Penyebab pegawai mogok kerja dan tidak melaksanakan tugas pekerjaannya secara efektif adalah tidak terpenuhinya hak-hak pekerja terhadap apa yang telah disepakati sebelumnya.

Aktivitas kerja yang dilakukan oleh karyawan PT. Swakarya Indah Busana melibatkan sekitar 280 karyawan. Apabila pengusaha perusahaan tidak juga membayar upah karyawan, maka mogok karyawan akan dimulai pada tanggal 27 September 2023 dan berlanjut hingga tanggal 29 September 2023. Karena gajinya, karyawan PT. Swakarya Indah Busana tiga bulan belum dibayar, dan THR tetap belum dibayar. Tiga bulan yang dimaksud adalah Juli, Agustus, dan September. Hal ini membuat karyawan was-was terhadap pimpinan perusahaan.

Aktivitas mogok kerja yang dilakukan karyawan berlokasi di area PT. Swakarya Indah Busana. Situasi yang ada di PT. Swakarya Indah Busana pada masa mogok kerja juga diperiksa petugas polisi. Hal ini

dilakukan untuk mencegah akibat negatif. Dalam situasi ini, para karyawan sebelumnya mengalami kesulitan dalam pembayaran upahnya. Pengalaman menjalankan mogok pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan PT. Swakarya Indah Busana sudah tiga kali (Wulansari 2023).

Mogok kerja di tempat kerja yang dilakukan karyawan juga terjadi pada April 2023, dengan sebab THR yang belum cair dan pimpinan perusahaan yang belum berdamai sepenuhnya. Hanya memperoleh satu juta, Karyawan akan dijanjikan sisanya dalam bulan mei serta bulan juni dan juli mendatang. Bahkan pada bulan Juli hingga September THR masih belum terpenuhi. Dalam situasi ini atasan yaitu serikat pekerja atau pegawai bawahan juga sudah menyampaikan kekhawatirannya kepada dinas tenaga kerja. Namun berdasarkan informasi yang ada, pemerintah belum melakukan intervensi dalam mengatasi masalah tertentu.

Karena pembeli produk perusahaan tidak melakukan pembayaran, menjadi alasan ketidakmampuan perusahaan membayar upah karyawan secara tidak jelas. Terakhir, perusahaan perlu memperhatikan bahan baku dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam proses tersebut. Namun, perusahaan mesti benar-benar jujur mengenai kondisi pengupahan karyawan.

Selain itu, tim manajemen bisnis juga berupaya menyelesaikan perselisihan terkait

dengan menjual saham perusahaan dalam jumlah besar. Meski sempat terjadi ketegangan antara pihak perusahaan serta pegawai dalam pembayaran upah selama dua bulan ini, Disnaker Kepri tetap melaksanakan pengawasan, utamanya membahas gaji kerja pada bulan Oktober sampai Desember .

Dalam proses penyelesaian masalah tersebut, perusahaan telah menyelesaikan langkah pertama yaitu perdamaian perunding. Dalam perundingan ini, perusahaan juga akan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dimana akan membayarkan salah satu dari tiga bulan gaji yang belum dibayarkan kepada karyawan. Inspektorat Ketenagakerjaan Provinsi telah menyelesaikan wawancaranya dengan pemilik usaha, serikat pegawai, dan pegawai terkait. Berdasarkan hasil keseluruhan perundingan tersebut, upah yang ditetapkan pada Juli 2023 diberikan penuh pada 263 karyawan.

Sedangkan tunjangan hari raya yang terdapat dibayarkan pada bulan Desember 2023. Dengan saling menghormati antara pekerja dan pengusaha, pekerjaan normal akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2023. Sesuai dengan pedoman seperti Undang-undang yang mengatur proses perelihan buruh, penyelesaian harus dilakukan sesegera mungkin agar setiap permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tercapainya semangat kerja sama melalui langkah-

langkah yang ada dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Proses penyelesaiannya, serta memberikan klarifikasi mengenai permasalahan yang timbul antara buruh dan dunia usaha.

Ketegangan antara karyawan dan pemilik usaha di PT Swakarya Indah Busana telah mencapai titik terang dan telah ada pengawasan dalam menangani situasi sesuai aturan.

Simpulan.

Tindakan penunggakan upah yang dilakukan oleh PT. Swakarya Indah Busana yang tidak mampu membayar berlangsung selama tiga bulan, khususnya pada bulan Juli, Agustus, dan September. Perwakilan kerja karyawan PT. Swakarya Indah Busana bertanggung jawab atas pertemuan bersama pimpinan perusahaan, yang dimaksudkan untuk digunakan untuk mengukur apa yang menjadi hak karyawan.

Unsur yang terlibat dalam penyelesaian secara kekeluargaan ini hanya ada dua: penanggung jawab perusahaan yaitu manajer dan penanggung jawab hubungan kepegawaian yaitu serikat pekerja. Ketidakmampuan perusahaan membayar adalah dalam kasus pembeli yang menunggak pembayaran, tetapi tanggung jawab perusahaan atas hak pekerja tetap diupayakan.

Persetujuan perusahaan dalam membayar upah yang belum dilunasi dan sisa

tunjangan sehingga pekerja kembali bekerja seperti semula. Selain itu, Disnaker akan terus memantau gaji pegawai. Dengan kata lain, proses penyelesaian masalah di PT Swakarya Indah Busana telah diputuskan sesuai dengan undang-undang dan pedoman yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Serikat kerja yang mewakili permintaan para karyawannya yang melakukan aksi mogok kerja. Konflik atau perselisihan antar karyawan utama PT. Swakarya Indah Busana telah diselesaikan melalui beberapa mekanisme, antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengembangan kemitraan industrial.

Daftar Pustaka.

- A. Anwar. 2020. *Profesionalisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) dalam Revolusi Industri 4.0*. Jurnal MSDA. Vol. 8, No. 1.
- F. Aditya, B. Sarnawa. 2021. *Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Proses Mediasi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial*. Media of Law and Sharia, volume 2, nomor 2.
- Sardana, Suryati. 2020. *Pemenuhan Hak Normatif Buruh Harian Lepas Pada PT. Hanuraba Sawit Kencana*. Wajah Hukum, Volume 4(2).
- Manurung. 2022. *Pengaturan Hukum Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 8 No.2.

Nelson. 2023. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Industri Pertambangan*. Jurnal Mirai Management. Volume 8, Issue 1.

P. Zaman. (2011). *Pedoman Hubungan Industrial*. Jakarta: PPM Manajemen.

Satriani, Hj. Suharty, Hj. Ratna. 2020. *Problematika Sosial Ekonomi Buruh Kapal Malam Di Pelabuhan Nusantara Raha Kabupaten Muna*. Societal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Vol. 7, No. 1.

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta